

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020. Renja ini disusun agar menjadi kerangka dan acuan kerja bagi seluruh Unit Kerja pada jajaran Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada prinsip pengelolaan hutan lestari secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, aspiratif dan akuntabel.

Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan fungsi-fungsi desentralisasi lainnya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu **“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”**.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi acuan koordinasi, sinkronisasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya hutan secara optimal, seimbang dan berkelanjutan serta untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam penanganan permasalahan sektor kehutanan yang saat ini sedang berkembang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Agustus 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Ir. SRI SUWANTO, M.S
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/318/2019
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 902/ 241 /DISHUT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-22
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	IV-1
4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	IV-2
4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	IV-3
4.4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	IV-3
4.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	IV-4
4.6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	IV-4
4.7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	IV-4
4.8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	IV-5
4.9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	IV-5
4.10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	IV-6
4.11. Program Perencanaan dan Pengembangan	IV-7
4.12. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	IV-7
4.13. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial	IV-8
BAB V. PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Realisasi Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Sumber Anggaran	II-1
Tabel II.2	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.01)	II-3
Tabel II.3	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.02)	II-4
Tabel II.4	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.03)	II-5
Tabel II.5	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.04)	II-5
Tabel II.6	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.05)	II-5
Tabel II.7	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.06)	II-6
Tabel II.8	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.08)	II-6
Tabel II.9	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.15)	II-6
Tabel II.10	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.16)	II-7
Tabel II.11	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.17)	II-8
Tabel II.12	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.20)	II-8
Tabel II.13	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.23)	II-9
Tabel II.14	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.27)	II-9
Tabel II.15	Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan (DAK dan DBH-DR)	II-10
Tabel II.16	Pelaksanaan Renstra Per Program terkait capaian kinerja sampai dengan Tahun Berjalan (TA.2019)	II-11
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra - PD s/d Tahun 2019	II-11
Tabel II.17	Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PSDH/DR dari IUPHHK-HA/HT dan IIUPH Tahun 2018	II-13
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan	II-17
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	II-21
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020	II-22
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	IV-8

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan kewajiban setiap perangkat daerah dalam memulai pelaksanaan pembangunan daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja-PD. Penyusunan Renja-PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja-PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Renja-PD memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Renstra-PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan bersifat indikatif berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pembangunan daerah yang mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Renja-PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dalam penentuan isu-isu strategis terdapat dua sumber yaitu : (1) mengacu pada visi dan misi pembangunan Kepala Daerah dan (2) tugas-tugas umum lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Renja-PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan fungsi-fungsi desentralisasi di bidang kehutanan. Terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan sektor kehutanan, telah dibentuk 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dalam penyusunan Renja-PD Dinas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 memperhatikan pula sinergitas perencanaan antara perencanaan Dinas dengan perencanaan UPT-KPH.

Renja-PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, disusun agar bersinergi dengan memperhatikan Renja Kabupaten/Kota agar tercapai keselarasan dan sinergitas perencanaan pembangunan kehutanan antara provinsi dengan kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan kewenangan daerah dalam pembangunan sektor kehutanan.

Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja - PD ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD dan berpedoman pada Renstra-PD serta Renja Kementerian/Lembaga. Selanjutnya Renja-PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam proses penyusunan RAPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020;

- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
- p. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
- u. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dimaksudkan sebagai penjabaran secara aspiratif dan konkrit dari perencanaan dan strategi pembangunan daerah yang didasarkan pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalam

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah serta sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan fungsi-fungsi desentralisasi agar terdapat program/rencana dan kegiatan yang fokus pada masalah dasar kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan, kelestarian ekosistem sumber daya hutan dan pertumbuhan yang semakin membaik dan tertib dalam dunia usaha kehutanan.

b. Tujuan

- b.1. Tercapainya koordinasi, sinkronisasi dan efisiensi pengelolaan sumber daya hutan secara optimal, seimbang dan berkelanjutan ;
- b.2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam penanganan permasalahan sektor kehutanan yang sedang berkembang;
- b.3. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- b.4. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- b.5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Renja - PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini memuat Latar Belakang penyusunan Renja PD, Landasan Hukum yang digunakan, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renja - PD.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Bab ini menyajikan informasi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan capaian Renstra - PD, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan tujuan dan sasaran Renja-PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi kegiatan , kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V. PENUTUP, merupakan gambaran umum kondisi pelaksanaan Renja-PD dan kaidah pelaksanaan Renja-PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2018 mempunyai pagu anggaran sebesar **Rp. 193.631.508.773,-** (*Seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 72.998.853.008,-
- Belanja Langsung : Rp. 120.632.655.765,-

Jumlah program dan kegiatan yang dijalankan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 13 (Tiga Belas) Program dan 91 (sembilan puluh satu) Kegiatan. Pada tahun 2018, realisasi pelaksanaan kegiatan belanja langsung PD-Dinas Kehutanan berdasarkan sumber anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.1
Realisasi Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Sumber Anggaran

Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% keuangan	% fisik
- APBD	21.486.684.265,-	17.896.832.367,-	83,29	85
- DAK	3.317.000.000,-	3.280.300.000,-	98,89	100
- DBH-DR	95.828.971.500,-	32.547.247.104,-	33,96	35

Berdasarkan rincian Tabel II.1, bahwa persentase penyerapan anggaran terkecil pada anggaran yang bersumber dari DBH-DR, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kehutanan wajib menggunakan dana DBH-DR di TA. 2018, karena dana tersebut merupakan hutang beban di tahun anggaran 2017, sehingga harus dilaksanakan di tahun anggaran berjalan (TA.2018).
2. Penyusunan anggaran dari DBH-DR masuk dalam mekanisme perubahan anggaran tahun 2018, sehingga membutuhkan pembahasan yang panjang oleh TAPD dan legislatif.
3. APBD-P TA. 2018, disahkan pada Oktober 2018, namun kesiapan anggaran efektifnya baru pada bulan Nopember 2018, akibatnya waktu pelaksanaan efektif kegiatan sangat tidak mencukupi.

untuk mengantisipasi agar hal sama tidak terulang kembali, maka penganggaran dari dana yang bersumber DBH-DR telah kami susun dalam Renja Tahun 2020 sebagai gambaran dan dapat dimasukkan dalam struktur sumber pendapatan pada saat pembahasan terkait anggaran untuk tahun 2020 dan tahun selanjutnya.

2.1.1 Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (TA. 2018)

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Renja-PD Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan cukup lancar, namun terdapat kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan Renja Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Human error, kesalahan baik berupa kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh person baik oleh internal person maupun external person.
 - ketidaktaatan pelaksanaan kegiatan pada jadwal yang telah ditentukan dalam anggaran kas kegiatan, akibatnya banyak belanja-belanja kegiatan yang menumpuk pada triwulan terjadwal namun tidak direalisasikan atau minim realisasi pada triwulan terjadwal, dampaknya pada penyerapan anggaran yang berdigit rendah dibawah target.
 - kurangnya kepedulian pada lingkungan yang dilakukan oleh segelintir oknum dengan melakukan kegiatan yang menambah degradasi terhadap kualitas lingkungan seperti membakar lahan dan melakukan illegal logging.
2. Force majeure/keadaan kahar, kejadian yang tidak dapat dihindari terjadi di luar kemampuan manusia.

Keadaan kahar sangat berdampak pada kegiatan-kegiatan fisik, dimana akibatnya dapat menunda jadwal pelaksanaan pekerjaan yang pada keluarannya nanti berpengaruh pada hasil yang telah ditentukan, karena itu butuh perencanaan yang cukup matang dalam penganggaran kegiatan.

Dengan memperhatikan kendala diatas diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan Renja di tahun selanjutnya.

Berikut disajikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018, untuk predikat capaian kinerja berdasarkan capaian fisik kegiatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini, kegiatan-kegiatan didalamnya merupakan kegiatan rutin untuk pemenuhan kebutuhan dasar kantor, sehingga pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan rutin kantor, kendala yang muncul yaitu keterlambatan dalam pembayaran honor untuk tenaga kebersihan kantor, karena permasalahan perubahan rekening belanja dari belanja barang dan jasa ke rekening belanja pegawai honorer/tidak tetap yang harus melalui mekanisme perubahan anggaran sehingga menunggu pengesahan dokumen sampai dengan bulan Oktober 2018 dan telah dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.

Tabel II.2
**Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.01)**

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		keuangan	Fisik	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74,25	74,85	S
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,94	66,67	S
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,31	100,00	ST
4.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	20,06	23,33	SR
5.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	86,21	88,00	T
6.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	97,04	100,00	ST
7.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	96,86	100,00	ST
8.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100,00	100,00	ST
9.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	98,78	100,00	ST
10.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97,30	100,00	ST
11.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	77,78	100,00	ST
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57,32	62,07	R
13.	Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00	100,00	ST
14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	72,20	79,90	T
15.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	99,44	100,00	ST
16.	Rujukan berobat PNS	0,00	0,00	SR

Kendala utama yang mempengaruhi kurang tercapainya target adalah terdapat barang/sarana prasarana yang bukan aset dari Dinas Kehutanan atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk pemeliharaan atau belanja jasa yang diperuntukkan pada objek tidak dapat dieksekusi/dibayarkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat kegiatan yang dibiayai melalui DAK yaitu Kegiatan Pembangunan gedung kantor dengan keluaran terbangunnya kantor RPH UPT-KPH sebanyak 6 unit dan berhasil sukses 100% terbangun sesuai target dan tender yang telah disepakati. Terdapat pula beberapa kegiatan fisik yang rampung 100% sesuai target.

Tabel II.3
**Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.02)**

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pembangunan gedung kantor	98,89	100,00	ST
2.	Pengadaan mobil jabatan	97,13	100,00	ST
3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	98,39	100,00	ST
4.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	66,65	100,00	ST
5.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	94,58	100,00	ST
6.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	56,91	62,07	R
7.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00	100,00	ST
8.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	41,99	49,23	R
9.	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	96,61	100,00	ST
10.	Pemeliharaan rutin berkala Mess KKMA Palangka Raya	70,56	100,00	ST
11.	Rehabilitasi sedang/berat asrama KKMA	96,60	100,00	ST
12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Kantor Dinas Kehutanan Lanjutan	96,49	100,00	ST
13.	Rehabilitasi Plafon Tritisan Gedung Utama Kantor Dinas Kehutanan	97,92	100,00	ST
14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Lapangan Tennis Dinas Kehutanan	97,46	100,00	ST
15.	Sewa Rumah/Gedung/GUDang/Parkir	86,36	100,00	ST
16.	Rehabilitasi Atap Kantor Dinas Kehutanan	61,47	68,97	S
17.	Penataan Halaman Parkir Gedung Kantor	91,17	100,00	ST

kendala utama yang mempengaruhi kurangnya capaian target adalah force majeure untuk Kegiatan Rehabilitasi Atap Kantor Dinas Kehutanan, dimana kondisi cuaca yang berubah-ubah dan ekstrem mengakibatkan tertundanya jadwal pekerjaan yang berdampak pada penyelesaian pekerjaan, namun terkait rehabilitasi atap kantor telah dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan untuk merampungkan pekerjaan yang tertunda.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini, target kegiatan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan dan ketetapan/rampung 100%.

Tabel II.4
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.03)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00	100,00	ST

4. Program Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Pada program ini, anggaran digunakan untuk belanja bagi personil yang telah purna tugas saat melakukan tugas kedinasan atau wafat saat melaksanakan tugas, sehingga belanja dibayarkan bila terjadi kejadian dimaksud.

Tabel II.5
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.04)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	0,00	0,00	SR

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan keperluan sehingga realisasi belanja sesuai dengan keperluan kegiatan.

Tabel II.6
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.05)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	70,24	100,00	ST
2.	Studi lapangan dalam negeri	36,09	46,67	SR

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini, target dapat dicapai rampung 100% dengan penyediaan buku/dokumen akuntabilitas OPD berupa LKIP, laporan tahunan dan laporan statistik kehutanan.

Tabel II.7
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.06)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	87,44	100,00	ST

7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Pada program ini, kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel II.8
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.08)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	94,81	100,00	ST

8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pada program ini, hampir seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target.

Tabel II.9
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.15)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	99,50	100,00	ST
2.	Monitoring dan evaluasi standar akutansi kehutanan	99,42	100,00	ST
3.	Identifikasi Areal Hutan Alam Untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	86,98	100,00	ST
4.	Sosialisasi, promosi dan fasilitasi untuk pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan	74,11	100,00	ST
5.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE	74,29	77,14	T
6.	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPHHK, IPKH/TMKH dan APL	94,83	100,00	ST

9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pada program ini, kegiatan yang dilaksanakan hampir seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan target, namun terdapat kegiatan yang belum terealisasi disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan efektif kegiatan, sebagai dampak dari keterlambatan pengesahan dokumen perubahan anggaran. Memperhatikan kendala tersebut, diharapkan di tahun selanjutnya agar pengesahan dokumen perubahan dapat dilaksanakan sesuai jadwal sehingga kegiatan-kegiatan yang masuk dalam perubahan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel II.10
**Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.16)**

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	88,95	100,00	ST
2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	0,00	0,00	SR
3.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan	100,00	100,00	ST
4.	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab./Kota	100,00	100,00	ST
5.	Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	73,04	100,00	ST
6.	Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	100,00	100,00	ST
7.	Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	100,00	100,00	ST
8.	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS	0,00	0,00	SR
9.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS	81,73	100,00	ST
10.	Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL) (DBH-DR)	0,00	0,00	SR

Pada kegiatan point-1 telah disediakan bibit kehutanan yaitu sengon, sebanyak 40.000 batang serta telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya.

10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Pada program ini, kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target kecuali kegiatan yang masuk dalam perubahan anggaran TA. 2018, kurang mencapai target disebabkan waktu pelaksanaan efektif kegiatan yang tidak cukup.

Tabel II.11
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.17)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan	84,47	100,00	ST
2.	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	94,00	100,00	ST
3.	Operasional Pengamanan Hutan	99,09	100,00	ST
4.	Pengamanan hutan terpadu	97,50	100,00	ST
5.	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	84,60	100,00	ST
6.	Pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran di bidang kehutanan	62,59	81,03	T
7.	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah	78,64	100,00	ST
8.	Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	4,82	5,26	SR
9.	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	36,51	39,58	SR
10.	Pembuatan Peta Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengolahan Data Informasi dan Diseminasi Monitoring Hotspot Tingkat Posko Provinsi (DBH-DR)	0,00	0,00	SR
11.	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah (DBH-DR)	0,00	0,00	SR
12.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	0,00	0,00	SR
13.	Pelatihan/Pembekalan/Inhouse training/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	86,21	100,00	ST
14.	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH-DR)	0,00	0,00	SR
15.	Patroli Pengamanan Hutan (DBH-DR)	68,07	77,78	T

11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Pada program ini, kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target kecuali kegiatan point-3, disebabkan masuk dalam perubahan anggaran sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak cukup.

Tabel II.12
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.20)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	95,62	100,00	ST
2.	Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Penyuluhan kehutanan	88,43	100,00	ST
3.	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	40,06	40,60	SR

12. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Pada program ini, target kegiatan tidak banyak tercapai, disebabkan kegiatan masuk dalam mekanisme perubahan anggaran TA.2018, sehingga kegiatan tidak dapat optimal dikerjakan karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup.

Tabel II.13
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.23)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	0,00	0,00	SR
2.	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan/Non Pertambangan	90,54	100,00	ST
3.	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	61,10	78,57	T
4.	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	44,58	100,00	ST

13. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Pada program ini, kegiatan-kegiatan mampu dilaksanakan sesuai dengan target, kecuali kegiatan pada point-14,15 yang kurang memenuhi target karena tidak cukup waktu pelaksanaan efektif dalam melaksanakan kegiatan sebagai dampak keterlambatan dalam pengesahan perubahan anggaran TA. 2018.

Tabel II.14
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (3.04.01.01.27)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
1.	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	90,30	100,00	ST
2.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	90,34	100,00	ST
3.	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	100,00	100,00	ST
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	98,55	100,00	ST
5.	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	97,50	100,00	ST

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik	
6.	Pameran Kehutanan	99,28	100,00	ST
7.	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	64,64	92,86	ST
8.	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	84,43	100,00	ST
9.	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	81,33	100,00	ST
10.	Identifikasi Hutan Adat	100,00	100,00	ST
11.	Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	100,00	100,00	ST
12.	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	89,46	100,00	ST
13.	Sosialisasi Hutan Adat	81,79	100,00	ST
14.	Penilaian Lomba Wana Lestari	65,21	71,43	S
15.	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat melalui Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	61,99	100,00	ST
16.	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Melalui Sosialisasi Tingkat Tapak	90,10	100,00	ST
17.	Pendampingan Kegiatan RHL dalam Kegiatan Identifikasi Areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan	93,45	100,00	ST

Berikut disajikan evaluasi kegiatan yang bersumber dari DAK dan DBH-DR:

Tabel II.15
Daftar kegiatan terkait capaian target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan (DAK dan DBH-DR)

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Sumber Dana	Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik		
1.	Pembangunan gedung kantor	98,89	100,00	DAK	ST
2.	Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL)	0,00	0,00	DBH-DR	SR
3.	Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	4,82	5,26	DBH-DR	SR
4.	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	36,51	39,58	DBH-DR	SR
5.	Pembuatan Peta Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengolahan Data Informasi dan Diseminasi Monitoring Hotspot Tingkat Posko Provinsi	0,00	0,00	DBH-DR	SR
6.	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah	0,00	0,00	DBH-DR	SR
7.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	0,00	DBH-DR	SR
8.	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyelenggaraan/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	86,21	100,00	DBH-DR	ST

No.	Kegiatan	Realisasi (%)		Sumber Dana	Predikat Kinerja
		Keuangan	Fisik		
9.	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	0,00	0,00	DBH-DR	SR
10.	Patroli Pengamanan Hutan	68,07	77,78	DBH-DR	T
11.	Penilaian Lomba Wana Lestari	65,21	71,43	DBH-DR	S
12.	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat melalui Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	61,99	100,00	DBH-DR	ST
13.	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Melalui Sosialisasi Tingkat Tapak	90,10	100,00	DBH-DR	ST
14.	Pendampingan Kegiatan RHL dalam Kegiatan Identifikasi Areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan	93,45	100,00	DBH-DR	ST

2.1.2 Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Renstra sampai dengan Tahun Berjalan (TA. 2019)

Tabel II.16
Pelaksanaan Renstra Per Program terkait capaian kinerja sampai dengan Tahun Berjalan (TA.2019)

No.	Program	Capaian Kinerja (%)	Predikat Kinerja*)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	102	ST
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	158	ST
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	208	ST
4.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	21	SR
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68	S
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	83	T
7.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	233	ST
8.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	53	R
9.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	62	R
10.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	48	SR
11.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	77	T
12.	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	62	R
13.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial	79	T
JUMLAH		97	ST

Keterangan:

Predikat	Interval Nilai (%)
Sangat Tinggi (ST)	91 ke atas
Tinggi (T)	76 ≤ 90
Sedang (S)	66 ≤ 75
Rendah (R)	51 ≤ 65
Sangat Rendah (SR)	50 ke bawah

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Sesuai dengan pedoman penyusunan Renja, maka untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dilihat pada Tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan PD berdasarkan Indikator Kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Kehutanan digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana tugas pokok, fungsi dan wewenang adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan
4. Penyelenggaraan pembinaan hutan
5. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan
6. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan
7. Penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan

2.2.1. Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama tahun 2018, capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran I: Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Secara Berkelanjutan

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **90%** dari target penerimaan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Target 100% penerimaan PNBP Provinsi Kalimantan Tengah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.816.219.054.040,35 dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah diberikan target PNBP sebesar 90% atau sebesar Rp. 734.597.148.636,32,-.

Realisasi penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pengusahaan Hutan (IIUPH) yang direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Kalimantan Tengah Tahun 2018 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel II.17
Rekapitulasi Realisasi Penyetoran PSDH/DR dari IUPHHK-HA/HT dan IIUPH Tahun 2018

No	Jenis PNBP	Realisasi (Rp)
1	PSDH	212.912.020.370,00
2	DR	608.192.491.846,00
3	IIUPH	36.167.818.513,00
Jumlah		857.883.179.479,00

Dari hasil rekapitulasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1 diatas, total penerimaan PNBP Tahun 2018 adalah sebesar Rp **857.883.179.479,00** atau 105,03% dari target Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat kelebihan (surplus) penerimaan dari target yang ditetapkan sebesar 5,10% atau senilai Rp. 41.664.125.438,65.

Indikator Kinerja Utama lain yang mendukung sasaran ini adalah peningkatan nilai kinerja pemegang IUPHHK menjadi predikat BAIK dan pada tahun 2018 tercapai 54 unit manajemen dari target sebanyak 45 Unit manajemen, capaian kinerja sebesar 120,00%.

Sasaran II : Meningkatnya Luas Areal Rehabilitasi Lahan di dalam dan di luar Kawasan Hutan

Salah satu indikator yang diukur adalah luas areal rehabilitasi di dalam dan di luar kawasan hutan. Pada Tahun 2018 target rehabilitasi lahan sebesar 0,049% dari luas lahan kritis seluas 5.144.703,61 Ha yaitu $\pm$ 2.500 Ha. Realisasi kegiatan rehabilitasi yang telah dilakukan yaitu 0,080% atau seluas $\pm$ 4.116 Ha, capaian kinerja sebesar 149,03%.

Sasaran III : Meningkatnya Akses Kelola Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat

Luas kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat. Kegiatan ini terkait dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan melalui penyediaan areal kelola Hutan berupa pengembangan Perhutanan Sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Tahun 2018 target yang ingin dicapai terkait penetapan ijin pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adalah pemanfaatan areal kelola hutan. Realisasi kegiatan adalah keluarnya ijin pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat berupa SK Hutan Desa (HPHD), SK Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKM).

Target indikator kinerja yang ditetapkan adalah 14 izin, realisasi sebanyak 92 izin, capaian kinerja sebesar 657,14%.

Sasaran IV : Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan

Salah satu indikator kinerja utama yang dipakai untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah titik panas (*hotspot*) sebagai indikasi peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengalami penurunan sebesar 20% setiap tahunnya. Target jumlah hotspot tahun 2018 adalah sebesar 2.074 titik (target penurunan 20%). Tahun 2018 jumlah titik hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 7.088 titik, terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 5.014 titik (341,75%) dari target yang ditetapkan.

Target kinerja indikator ini adalah semakin kecil jumlah hotspot maka capaian kinerja semakin baik begitu pula sebaliknya, semakin tinggi jumlah hotspot semakin kecil capaian kinerja, terkait dengan kinerja di tahun 2018, maka tersimpulkan bahwa capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 141,75% (-141,75%).

Untuk gangguan sumber daya hutan berupa illegal logging pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 26 kasus sedangkan yang terpantau sebanyak 11 kasus, terdapat penurunan sebanyak 15 kasus atau 56%, sementara target penurunan jumlah kasus illegal logging adalah menurun sebesar 20% per tahun, sehingga capaian kinerja ini dapat dikatakan sangat memuaskan, capaian kinerja sebesar 125%.

Pemberantasan illegal logging dimaksudkan untuk membangun persepsi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Tengah bahwa illegal logging dan peredaran kayu illegal telah menyebabkan masalah multidimensi sehingga diharapkan tercapai kesepakatan dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memberantas illegal logging.

Sasaran V : Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 15 % yaitu pengelolaan unit KPH. Jumlah KPH di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan adalah sebanyak 33 unit. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Penetapan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (delapan belas) unit dan pada Tahun 2017 telah terbit Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara teknis, kelembagaan unit pengelolaan kawasan hutan telah 100% terbentuk, target berikutnya adalah percepatan penyelesaian dokumen perencanaan teknis kegiatan UPT-KPH yang diatur oleh peraturan Menteri KLHK, yaitu Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd), dari 18 UPT-KPH baru terealisasi 16 UPT-KPH yang dapat menyelesaikan Dokumen RPHJP.

2.2.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2018 berupa pendapatan restribusi daerah sebesar Rp. 327.041.554,- atau mencapai 130,82 % dari target anggaran pendapatan sebesar Rp. 250.000.000,-.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 119.032.766.049,- atau 61,47% dari pagu anggaran sebesar Rp. 193.631.508.773,-. Dengan realisasi fisik sebesar 63,01%.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada anggaran kas, disebabkan oleh kelalaian dari PPTK selaku pengendali kegiatan.
2. Penambahan anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp 95.828.971.500,- pelaksanaan efektif kegiatan pada bulan Nopember 2018, sehingga dapat terserap sebesar Rp. 32.547.247.104 atau 33,96%.
3. Force majeure/keadaan kahar, dimana kondisi cuaca yang berubah-ubah dan ekstrim, sehingga mengganggu jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan PPTK terkait agar lebih memperhatikan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan sehingga pada saat pencairan dana kegiatan tidak overlap dengan pencairan kegiatan lain yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Menganggarkan kegiatan yang bersumber dari DBH-DR lebih awal sehingga dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
3. Untuk antisipasi *force majeure/keadaan kahar*, agar memperhitungkan segala data/informasi dalam penyusunan perencanaan yang lebih matang terutama untuk kegiatan yang bersifat fisik/pengadaan barang dan jasa.

Untuk kegiatan dan program sampai dengan tahun 2018 sudah mengikuti Program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah setelah renstra ditetapkan yang harus dipedomani oleh setiap PD.

Berikut merupakan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, dengan jabatan Eselon II.a
2. Sekretaris, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Sub. Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNB
4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), dengan jabatan Eselon II.a membawahi
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
5. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan DAS
 - b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
6. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat dengan jabatan Eselon III.a membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan Kehutanan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Hutan Adat
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas

Untuk Pencapaian kinerja pelayanan SKPD tersaji dalam Tabel T-C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Pemantapan kawasan hutan serta peningkatan kualitas data dan informasi kehutanan.
2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara lestari untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan berusaha bagi masyarakat lokal dengan tetap menjaga kearifan lokal masyarakat sekitar hutan.
3. Pemantapan upaya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan serta konservasi sumberdaya alam.
4. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan guna meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
5. Pemantapan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan di Kalimantan Tengah dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kehutanan serta dengan mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan memperhatikan kewenangan pemerintah daerah provinsi sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk sektor kehutanan.

Dari review yang dilakukan terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan Dinas Kehutanan, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini dilakukan pencermatan dalam pembagian pagu pada masing-masing kegiatan, dikarenakan terdapat penganggaran yang kurang tepat pada beberapa kegiatan rutin, dengan memperhatikan hasil evaluasi pada tahun lalu, dilakukan pencermatan dan rasionalisasi pada beberapa kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat usulan kegiatan baru yaitu Pembangunan Gudang Senjata Api, dimana merupakan tuntutan kebutuhan yang sifatnya penting, disebabkan imbas dari kebijakan pemerintah pusat mengenai kewenangan

pemerintah daerah (tertuang dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014), sehingga dilakukan penarikan seluruh senjata api dan kelengkapannya yang merupakan aset pengamanan hutan dari seluruh Kabupaten/Kota ke Provinsi dimana menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah provinsi yang bersangkutan (Dinas Kehutanan). Pada Dinas Kehutanan Provinsi belum memiliki gudang senjata api, sehingga sangat penting untuk dapat direalisasikan di Tahun 2020, sebagai pengamanan sementara, senjata api tersebut dititipkan pada Kantor SPORC/Balai GAKKUM LHK Seksi Wilayah I Kalimantan Tengah.

Selain itu, terdapat kegiatan rehabilitasi dan renovasi pada bangunan-bangunan kantor dengan tujuan menjaga keamanan lingkungan kantor dan kenyamanan dalam melaksanakan aktifitas di kantor serta mendukung kemudahan akses data/informasi melalui perangkat digital yang disediakan dalam bentuk aplikasi sistem informasi perkantoran.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini, terdapat usulan pengadaan atribut kelengkapan seragam ASN untuk pemenuhan amanat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada perubahan APBD Tahun 2019, kegiatan ini telah dilaksanakan, oleh karena itu diganti dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga, agar menambah kebugaran fisik aparatur sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Pada program ini, anggaran digunakan untuk belanja bagi personil yang telah purna tugas saat melakukan tugas kedinasan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pada program ini, terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, yaitu adanya usulan kegiatan peningkatan kapasitas SDM fungsional tertentu dan penilaian angka kredit bagi JFT Dinas Kehutanan.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada program ini, terdapat perbedaan dengan RKPD, penganggaran digunakan untuk kegiatan penyusunan analisa jabatan bagi Dinas Kehutanan dan 18 UPT

KPH yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah pegawai sekitar 600 orang, sehingga diperlukan upaya agar administrasi kepegawaian dapat tertib dan terpetakan. Selain itu disediakan anggaran untuk pemenuhan pelaporan akuntabilitas kinerja, kegiatan dan keuangan pada Perangkat Daerah (PD).

7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Pada program ini, selaras dengan RKPD Tahun 2020, penganggaran digunakan untuk pendataan dan pemeliharaan aset/barang daerah lingkup Dinas Kehutanan.

8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pada program ini terdapat kegiatan yang berbeda dengan rancangan awal RKPD yaitu pada Kegiatan Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan, dimana kegiatan ini sebagai pelaksanaan tupoksi dari UPT-KPH sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kehutanan berupa pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam wilayah kerjanya, selain itu terdapat beberapa kegiatan yang dirasionalisasi penganggarnya dengan pengalihan penganggaran pada kegiatan yang lebih prioritas. Dalam program ini pula terdapat usulan kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu, dengan tujuan untuk mendorong munculnya sumber-sumber PAD yang dikelola oleh UPT-KPH dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.

9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pada program ini terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, yaitu rasionalisasi pada beberapa kegiatan yang penganggarnya dialihkan pada kegiatan yang lebih prioritas.

10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Pada program ini terdapat kegiatan yang berbeda dengan rancangan awal RKPD, baik dari penambahan kegiatan maupun target yang harus dicapai terkait pengendalian karhutla dan pengamanan hutan dengan menyesuaikan pada tupoksi UPT-KPH yang telah dibentuk serta ditambahkan kegiatan baru, yaitu Kegiatan Bina Cinta Alam, dengan tujuan agar generasi muda dapat lebih peduli dengan kelestarian lingkungan.

11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Pada program ini terdapat kegiatan penyuluhan kehutanan yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk menampung ide-ide/informasi melalui tulisan berupa artikel dalam Majalah Padang Himba, pelayanan informasi publik dan database kehutanan merupakan binaan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mempromosikan produk-produk sektor kehutanan.

12. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Pada program ini terdapat kegiatan yaitu pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan, merupakan wujud pelaksanaan tupoksi dari Dinas Kehutanan mengacu pada Permen LHK Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan, merupakan formula bagi UPT-KPH untuk berkontribusi dalam penyediaan penguatan ketahanan pangan. Disamping itu, mengakomodasi pelaksanaan kerjasama UPT-KPH berdasarkan Permenhut LHK P.49/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

13. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial

Pada program ini terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD, dimana dilakukan rasionalisasi anggaran pada beberapa kegiatan untuk dialihkan pada kegiatan lain yang dianggap lebih prioritas.

Secara terinci dapat dilihat pada Tabel Review Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Tabel T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait pelayanan Dinas Kehutanan, telah pada tahapan kompilasi untuk usulan Musrenbangnas dan sudah dimasukkan dalam rancangan kerja perangkat daerah Dinas Kehutanan, usulan-usulan disajikan dalam Tabel T-C.32

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Terhadap kebijakan nasional yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, difokuskan pada prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Fokus prioritas pembangunan tersebut diarahkan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan konservasi sumber daya hutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dalam pengelolaan resiko bencana guna mengantisipasi perubahan iklim.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 juga tidak terlepas dari kebijakan pembangunan nasional dan hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Substansi isi pelaksanaan prioritas pembangunan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dalam RPJMN yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Pemantapan dan penataan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti oleh kegiatan sosialisasi fungsi kawasan hutan hasil paduserasi, penyusunan NSDH dan movev perijinan pemanfaatan kawasan hutan.
2. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diikuti oleh kegiatan sosialisasi, bintek dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Perlindungan dan pengamanan hutan yang juga mencakup pengamanan hutan terpadu dan penanganan pasca operasi pengamanan hutan.
4. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan meliputi : Penyediaan bibit tanaman kehutanan, koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan, pembinaan dan pengendalian gerakan penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam reboisasi hutan dan lahan.
5. Kegiatan-kegiatan yang bersifat monitoring yang mendukung program hutan lestari.

6. Pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) yang diharapkan mampu lebih mendekatkan pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai mitra dalam pengelolaan kawasan hutan untuk kesejahteraan yang lestari.
7. Menjaga kelestarian hutan melalui pendekatan yang pro-rakyat dengan menjaga hutan adat sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat bersinergi dengan budaya lokal masyarakat setempat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Renja-PD Tahun 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan melaksanakan 13 (tiga belas) program pembangunan kehutanan, dimana masing-masing program tersebut mempunyai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Adapun tujuan pembangunan kehutanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan menyediakan informasi ilmiah untuk dasar perencanaan makro kehutanan.
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan dan pemanfaatan hasil hutan yang efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
3. Menurunkan gangguan keamanan terhadap hutan dan hasil hutan dan menekan laju degradasi sumberdaya hutan.
4. Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyiapkan perangkat kebijakan, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan menyediakan sarana dan prasarana serta terlaksananya tertib administrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran rencana kerja yang hendak dicapai adalah :

1. Terdapatnya status kawasan hutan yang mantap dan terjaminnya pemanfaatan kawasan hutan yang sesuai dengan peruntukan dan daya dukung lahannya.
2. Tersedianya data yang akurat tentang luas dan peruntukan kawasan hutan serta potensi sumberdaya hutan di dalamnya sebagai dasar untuk optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan
3. Terlaksananya Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh pemegang ijin usaha kehutanan untuk hutan alam maupun hutan tanaman yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan berusaha bagi masyarakat di sekitar hutan.
4. Tertibnya industri kehutanan, penerapan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berbasis teknologi dan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak bidang kehutanan.
5. Diperolehnya kontribusi dari manfaat hutan selain kayu melalui diversifikasi pemanfaatan hutan alam.
6. Berkembangnya akses pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat lokal dalam bentuk ijin pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
7. Menurunnya jumlah hotspot kebakaran hutan dan meningkatnya pengelolaan kawasan lindung.
8. Menurunnya praktek penebangan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal, berkurangnya kasus perambahan kawasan hutan serta terselesaikannya konflik dan pelanggaran di bidang kehutanan.
9. Terjaminnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
10. Berkembangnya usaha hutan rakyat pada lahan milik masyarakat dan aneka usaha kehutanan oleh masyarakat lokal.
11. Efektifnya kebijakan kehutanan yang selaras dengan semangat otonomi daerah.
12. Mantapnya kelembagaan kehutanan dan terlaksananya fungsi dan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
13. Terlaksananya perhutanan sosial sebagai bentuk kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan.
14. Terpeliharanya sinergitas kebijakan pembangunan kehutanan dengan menjaga kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan hutan.

15. Terselenggaranya reformasi birokrasi untuk pelaksanaan program pembangunan kehutanan yang bersinergi, efektif dan efisien yang didukung SDM kehutanan yang kompeten dan profesional.
16. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan kehutanan.
17. Terjalinnnya kerjasama dalam rangka upaya penguatan ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan wilayah kelola UPT-KPH.
18. Mendorong kemandirian UPT-KPH dalam rangka pengembangan sumber pendapatan asli daerah selaras dengan tugas pokok dan fungsi nya.
19. Terselenggaranya partisipasi dan antusias masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kehutanan.
20. Tercapainya keidealan kelestarian taraf hidup masyarakat melalui pembangunan kehutanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Renja Tahun 2020, sesuai dengan **MISI-7 KALTENG-BERKAH, yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**, Dinas Kehutanan menyusun program dan kegiatan dengan arah kebijakan pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat pada UPT-KPH, pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat melalui pendampingan oleh UPT-KPH, upaya penurunan degradasi kualitas lingkungan beserta penurunan gangguan sumber daya hutan dan penguatan kedaulatan pangan, selain itu pengembangan usaha-usaha pengelolaan kawasan melalui perhutanan sosial dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melindungi kelestarian kualitas lingkungan.

Dengan semangat KALTENG-BERKAH, Dinas Kehutanan merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah melalui sektor kehutanan, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat-menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;

- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- i. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; dan
- p. Rujukan Berobat PNS.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pembangunan gedung kantor;
- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- g. Pembangunan gudang;
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess KKMA;
- i. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- j. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
- k. Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas; dan
- l. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pengadaan Pakaian olahraga.

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Tugas.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Studi Lapangan di Dalam Negeri;
- c. Pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- c. Penyusunan Analisa Jabatan;
- d. Penyusunan Laporan Tahunan Dinas; dan
- e. Pengembangan Reformasi Birokrasi.

7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pengelolaan Inventarisasi Barang Daerah.

8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu;
- b. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan;
- c. Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan;
- d. Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan;
- e. Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE; dan
- f. Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL.

9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan-kegiatan:

- a. Pembuatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan;
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan;
- c. Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab/Kota;

- d. Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau;
- e. Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik;
- f. Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar;
- g. Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan;
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS; dan

10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. Operasional Pengamanan Hutan;
- e. Pengamanan Hutan Terpadu;
- f. Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan;
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan;
- h. Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting;
- j. Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA; dan
- k. Bina Cinta Alam.

11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. Penyuluhan Kehutanan.

12. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Kegiatan-kegiatan :

- a. Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan/ penggunaan kawasan hutan;
- b. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
- c. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan;

- d. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi; dan
- e. Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

13. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan;
- c. Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
- e. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan;
- f. Pameran Kehutanan;
- g. Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa;
- h. Koordinasi dan Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa;
- i. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;
- j. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat;
- k. Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial;
- l. Pemenuhan Kewajiban Kemitraan Usaha Kehutanan;
- m. Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya;
- n. Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan;
- o. Sosialisasi Hutan Adat; dan
- p. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif.

Jumlah program sebanyak 13 program dan jumlah kegiatan sebanyak 89 kegiatan, sumber pendanaan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan DAK.

Dinas Kehutanan juga mendorong agar pemanfaatan DBH-DR dapat dimasukkan dalam struktur penganggaran APBD Tahun 2020 atau pada tahun berikutnya, untuk mengoptimalkan serapan kinerja sesuai dengan target dan jadwal yang tertuang dalam Renstra Dinas Kehutanan.

Dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan Dinas Kehutanan mampu melaksanakan tupoksi-nya dalam membangun Provinsi Kalimantan Tengah melalui sektor kehutanan sebagai bentuk dukungan pada Visi dan Misi yaitu KALTENG-BERKAH.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai salah satu perangkat daerah, dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah guna pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun. Adapun visi Gubernur Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

**“ KALIMANTAN TENGAH MAJU, MANDIRI & ADIL UNTUK KESEJAHTERAAN
SEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALIMANTAN TENGAH
BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH DAN HARMONIS)”**

Guna mewujudkan Visi tersebut ditetapkan beberapa misi Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Pengelolaan Insfrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai.
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
- 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan kehutanan di Kalimantan Tengah dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan kehutanan dan terkait visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah dan Renstra Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didalam Renja-PD Tahun 2020, akan melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 89 (delapan puluh sembilan) kegiatan. Program dan kegiatan-kegiatan serta indikator kinerja utama setiap program tersebut adalah :

4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini adalah Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Adapun indikator kinerja program ini adalah meningkatnya

sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat-menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- h. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- i. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- j. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
- o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; dan
- p. Rujukan Berobat PNS.

Pemenuhan kebutuhan anggaran pada masing-masing kegiatan disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kegiatan pada tahun lalu dan perkiraan adanya kenaikan harga/inflasi. Penganggaran digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin kantor dinas kehutanan dan 18 UPT-KPH.

4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan gedung kantor. Adapun indikator kinerja program ini adalah meningkatkan kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pembangunan gedung kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- h. Pembangunan gudang;
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess KKMA;
- j. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
- k. Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
- l. Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas; dan
- m. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi.

Pada program ini terdapat usulan kegiatan baru yaitu Pembangunan Gudang, dengan maksud untuk menampung senjata api yang merupakan aset Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tujuan pengamanan aset Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang masih dititipkan di Kantor SPORC/Balai GAKKUM LHK Seksi Wilayah I Kalimantan Tengah.

Direncanakan pula dilakukan renovasi/rehabilitasi pada pagar kantor untuk peningkatan keamanan lingkungan kantor serta membangun sistem informasi yang diharapkan mempermudah/memperlancar ketersediaan data/informasi terkait kegiatan Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses oleh berbagai pihak.

4.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatnya disiplin pegawai, adapun indikator kinerja program ini adalah meningkatnya tingkat kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian olahraga.

Pengadaan pakaian olah raga dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam menjaga kondisi fisik/kebugaran jasmani dengan tujuan agar dapat bekerja dan berprestasi secara optimal.

4.4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Tujuan program ini adalah tersedianya bantuan pemulangan pegawai yang telah purna tugas atau tewas dalam pelaksanaan tugas. Adapun indikator kinerja program ini adalah terwujudnya fasilitas pindah/purna tugas PNS.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Tugas.

4.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatnya kemampuan teknis pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun indikator kinerja program ini adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- b. Studi Lapangan di Dalam Negeri;
- c. Pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada program ini, dilaksanakan peningkatan SDM aparatur guna menambah pengetahuan dan peningkatan kompetensi personil baik jabatan umum atau jabatan fungsional dengan tujuan peningkatan mutu SDM untuk pemenuhan capaian kinerja perangkat daerah.

4.6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan program ini adalah ketersediaan dokumen laporan capaian kinerja dan dokumen laporan keuangan. Adapun indikator kinerja program ini adalah pelaporan capaian kinerja tepat waktu.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- c. Penyusunan Analisa Jabatan;
- d. Penyusunan Laporan Tahunan Dinas; dan
- e. Pengembangan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini dimaksudkan untuk pemenuhan penyusunan laporan-laporan, data dan informasi terkait kinerja dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

4.7. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Tujuan program ini adalah terjamin dan terjaganya Aset/Barang milik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun indikator kinerja program ini adalah tersedianya data Aset/Barang Daerah yang akurat.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pengelolaan Inventarisasi Barang Daerah.

Pengelolaan aset Dinas Kehutanan harus dilaksanakan agar diketahui posisi/letak aset dimaksud dan kondisi dari aset tersebut. Dengan terlaporkannya keadaan aset, maka akan mendukung kinerja dinas kehutanan dan kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.8. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Tujuan program ini adalah tercapainya peningkatan pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan. Adapun Indikator kinerja program ini adalah persentase pencapaian target produksi hasil hutan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu;
- b. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan;
- c. Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan;
- d. Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan;
- e. Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK- HT dan IUPHHK- RE; dan
- f. Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin dan UPT-KPH, dengan tujuan agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tujuan Program ini adalah terjaminnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta upaya konservasi pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Indikator kinerja program ini adalah luas areal rehabilitasi hutan dan lahan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pembuatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan;
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan;

- c. Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab/Kota;
- d. Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau;
- e. Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik;
- f. Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar;
- g. Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan;
- h. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS;

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan target indikator kinerja utama Dinas Kehutanan terkait Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

4.10. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Tujuan Program ini adalah penurunan laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan. Adapun indikator kinerja program ini adalah persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- b. Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. Operasional Pengamanan Hutan;
- e. Pengamanan Hutan Terpadu;
- f. Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan;
- g. Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan;
- h. Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting;
- j. Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA; dan
- k. Bina Cinta Alam.

Pada program ini terdapat kegiatan baru yaitu Bina Cinta Alam, dimana pada kegiatan ini, dilakukan pembinaan bagi generasi muda untuk lebih peduli pada kelestarian alam.

4.11. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Tujuan Program ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan pengelolaan hutan dan Sumber Daya Manusia dibidang Kehutanan. Adapun indikator kinerja program ini adalah terselenggaranya reformasi birokrasi dan meningkatnya kapasitas SDM Kehutanan.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- c. Penyuluhan Kehutanan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan data/informasi perencanaan anggaran program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, tujuannya agar tersedianya dokumen acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya target yang telah ditentukan.

4.12. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Tujuan program ini adalah terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal. Adapun indikator kinerja program ini adalah ersentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan;
- b. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
- c. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan;
- d. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi; dan
- e. Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pada program ini terdapat kegiatan baru, pada point-b, dimana maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah menyusun rencana-rencana strategis bidang Kehutanan untuk tingkat provinsi, sehingga nantinya dapat disinergiskan dengan rencana pembangunan daerah tingkat provinsi.

4.13. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Serta Penanganan Konflik Tenurial

Tujuan program ini adalah terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal. Adapun indikator kinerja persentase pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi;
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan;
- c. Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan;
- e. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan;
- f. Pameran Kehutanan;
- g. Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa;
- h. Koordinasi dan Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa;
- i. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;
- j. Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat;
- k. Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial;
- l. Pemenuhan Kewajiban Kemitraan Usaha Kehutanan;
- m. Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya;
- n. Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan;
- o. Sosialisasi Hutan Adat; dan
- p. Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan, tujuannya adalah agar masyarakat menerima manfaat dari kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari 13 Program dan 89 Kegiatan yang dirumuskan, dapat dikelompokkan berdasarkan sumber dana, yaitu: (1) Sumber dana APBD sebanyak 87 kegiatan; dan (2) Sumber dana DAK sebanyak 2 kegiatan, diharapkan melalui mekanisme yang sesuai ketentuan dapat pula ditambahkan kegiatan yang bersumber dari DBH-DR dengan penganggaran yang disusun sejak awal penganggaran, sehingga memberikan serapan kinerja yang lebih optimal bagi Dinas Kehutanan dan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dari sektor kehutanan, berikut disajikan rumusan program dan kegiatan pada Tabel T-C.33

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun untuk acuan dalam penyusunan penganggaran program dan kegiatan di tahun 2020. Penyusunan format Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 mengacu pada struktur perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renja-PD, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta hasil evaluasi atas Rencana Kerja Tahun sebelumnya.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, telah disusun perumusan program dan kegiatan yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renja, serta upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut.

Selanjutnya penetapan indikator-indikator kinerja baik program maupun kegiatan dalam Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, telah memastikan ketercapaian setiap indikator dalam substansi inti Renja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian target-target yang dituangkan dalam program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan input proses khususnya berupa anggaran, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana di bawahnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala terus dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Dana yang diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik melalui DAK dan DBH Sumber Daya Alam/ DBH DR.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang disusun ini dapat dijadikan acuan dalam proses penentuan RAPBD dan penentuan KUA/PPAS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA. 2020 serta semoga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat dalam hal penyelenggaraannya di Tahun 2020.

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah.

Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada jajaran Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, maka harapan yang diinginkan dapat terwujud, dalam kerangka kelestarian hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Palangka Raya, Agustus 2019

Disusun oleh :
**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

Ir. SRI SUWANTO, M.S
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra - PD s/d Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 (akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d 2019	
					Target Renja SKPD 2018	Realisasi Renja PD 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3	Pilihan									
3.04	Kehutanan									
3.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat					80,93			102,41
3.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	12.000 surat	4.000 surat	8.000 surat	5.988 surat	74,85	8.000 surat	17.988 surat	149,90
3.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	18 rekening	5 rekening	3 rekening	2 rekening	66,67	4 rekening	11 rekening	61,11
3.04.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	726 unit	203 unit	500 unit	500 unit	100,00	100 unit	803 unit	110,58
3.04.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang diasuransikan	66 unit	18 unit	30 unit	7 unit	23,33	30 unit	55 unit	83,33
3.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perpanjangan STNK dan Jasa KIR	52 unit	17 unit	50 unit	44 unit	88,00	50 unit	111 unit	213,17
3.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai yang menerima honorarium	2.448 08	976 08	1.212 08	1.212 08	100,00	1.212 08	3.400 08	138,89
3.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor	12 jenis	4 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	8 jenis	66,67
3.04.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan yang memerlukan service	30 unit	7 unit	5 unit	5 unit	100,00	5 unit	17 unit	55,56
3.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan	179 jenis	76 jenis	28 jenis	28 jenis	100,00	28 jenis	132 jenis	73,74
3.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	49 jenis	18 jenis	8 jenis	8 jenis	100,00	8 jenis	34 jenis	69,39
3.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	37 jenis	14 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00	6 jenis	26 jenis	70,27
3.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	103.632 eks	24.897 eks	40.000 eks	24.828 eks	62,07	40.000 eks	89.725 eks	86,58

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang diadakan	1.250 porsi	107 porsi	250 porsi	250 porsi	100,00	250 porsi	607 porsi	48,56
3.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dan luar negeri	420 OT	140 OT	194 OT	155 OT	79,90	194 OT	489 OT	116,43
3.04.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	360 OT	156 OT	374 OT	374 OT	100,00	374 OT	904 OT	251,11
3.04.01.35	Rujukan berobat PNS	Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobat keluar daerah	30 orang	8 orang	5 orang	0 orang	0,00	5 orang	13 orang	43,33
3.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kenyamanan kerja apartur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat					60,78			158,00
3.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 bangunan	0 bangunan	6 bangunan	6 bangunan	100,00	14 bangunan	20 bangunan	100,00
3.04.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang tersedia	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100,00	0 unit	1 bangunan	100,00
3.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	30 jenis	4 jenis	22 jenis	22 jenis	100,00	20 jenis	46 jenis	153,33
3.04.02.13	Pembangunan pagar dan tempat parkir	Luas renovasi tempat parkir terbangun	0 meter	0 meter	0 meter	0 meter	0,00	92 meter	92 meter	100,00
3.04.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	6 rumah	2 rumah	1 rumah	1 rumah	100,00	1 rumah	4 rumah	66,67
3.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 gedung	2 gedung	20 gedung	20 gedung	100,00	20 gedung	42 gedung	700,00
3.04.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	32 mobil	12 mobil	29 mobil	18 mobil	62,07	29 mobil	59 mobil	184,86
3.04.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00	1 jenis	3 jenis	50,00
3.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	385 buah	65 buah	65 buah	32 buah	49,23	65 buah	162 buah	42,08
3.04.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Luas bangunan yang direhabilitasi	0 M2	0 M2	52 M2	52 M2	100,00	0 M2	52 M2	100,00
3.04.02.58	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess KKMA	Jumlah gedung asrama KKMA yang dipelihara	2 gedung	3 gedung	2 gedung	2 gedung	100,00	2 gedung	7 gedung	330,33
3.04.02.65	Rehabilitasi sedang/berat asrama KKMA	Jumlah ruangan kamar mandi/wc/toilet yang direhabilitasi	0 ruangan/unit	0 ruangan/unit	1 ruangan/unit	1 ruangan/unit	100,00	0 ruangan/unit	1 ruangan/unit	100,00
3.04.02.66	Rehabilitasi Mushola Asrama KKMA	Luas mushola asrama KKMA yang direhabilitasi	85 M2	85 M2	0 M2	0 M2	0,00	0 M2	85 M2	100,00
3.04.02.103	Pemeliharaan Taman dan Halaman	Jumlah lokasi yang dipelihara taman/halaman	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0 lokasi	0,00	1 lokasi	1 lokasi	100,00
3.04.02.113	Rehabilitasi Sedang/Berat Aula Kantor Dinas Kehutanan Lanjutan	Luas aula kantor yang direhabilitasi	462 M2	0 M2	462 M2	462 M2	100,00	0 M2	462 M2	100,00
3.04.02.116	Pembuatan Tower Asrama KKMA	Jumlah Unit Tower Air yang dibangun	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	2 unit	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.02.117	Rehabilitasi Sedang/Berat Kamar Mandi/WC Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Luas bangunan WC dan kamar Mandi Kantor Dinas Kehutanan yang direhabilitasi	112 M2	112 M2	0 M2	0 M2	0,00	20 M2	132 M2	117,86
3.04.02.119	Rehabilitasi Plafon Tritisn Gedung Utama Kantor Dinas Kehutanan	Luas plafon yang direhabilitasi	174 M2	0 M2	1.250 M2	1.250 M2	100,00	0 M2	1.250 M2	718,39
3.04.02.120	Rehabilitasi Sedang/Berat Lapangan Tennis Dinas Kehutanan	Luas pagar lapangan tenis yang direhabilitasi	M2	0 M2	605,25 M2	605,25 M2	100,00	0 M2	605,25 M2	
3.04.02.121	Rehabilitasi Plafon Sayap Kanan dan Kiri Gedung Kantor	Luas Plafon Gedung Sayap Kanan dan Kiri Yang Direhabilitasi	776,60 M2	776,60 M2	0,00 M2	0,00 M2	0,00	0 M2	776,60 M2	100,00
3.04.02.141	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang direnovasi	0,00 M2	0,00 M2	0,00 M2	0,00 M2	0,00	184 M2	184,00 M2	100,00
3.04.02.149	Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir	Jumlah gedung kantor yang disewa	70 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100,00	2 unit	5 unit	7,14
3.04.02.169	Rehabilitasi Atap Kantor Dinas Kehutanan	Jumlah gedung kantor yang disewa	1.070 M2	0 M2	2.130 M2	1.469 M2	68,97	450 M2	1.919 M2	179,35
3.04.02.174	Rehabilitasi Tower Air Kantor Dinas Kehutanan	Jumlah tower air yang direhabilitasi	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	2 unit	100,00
3.04.02.182	Penataan Halaman Parkir Gedung Kantor	Luas halaman parkir yang ditata	0 M2	0 M2	48 M2	48 M2	100,00	48 M2	96 M2	100,00
3.04.02.195	Rehabilitasi/ Perbaikan Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang direnovasi	0 M2	0 M2	0 M2	0 M2	0,00	10 M2	10 M2	100,00
3.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional					50,00			208,33
3.04.03.02	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	1.020 stell	170 stell	714 stell	714 stell	100,00	714 stell	1.598 stell	156,67
3.04.03.06	Pengadaan Pakaian Batik Tradisonal	Jumlah pegawai yang menerima pakaian batik tradisional	340 stell	170 stell	0 stell	0 stell	0,00	714 stell	884 stell	260,00
3.04.04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terfasilitasinya pegawai yang pindah dan purna tugas					0,00			20,83
3.04.04.02	Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas	12 Orang	1 Orang	2 Orang	0 Orang	0,00	2 Orang	3 Orang	20,83
3.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber Daya					36,67			68,32
3.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur	28 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100,00	10 Orang	20 Orang	71,43
3.04.05.22	Studi Lapangan di Dalam Negeri	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendampingi anggota Legislatif	90 OT	6 OT	15 OT	7 OT	46,67	15 OT	28 OT	30,56
3.04.05.23	Pembuatan Perda Perubahan Organisasi & Tata Kerja Dishut	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas	1 Perda	1 Perda	0 Perda	0 Perda	0,00	0 Perda	1 Perda	71,28

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.05.147	Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah JFT yang dinilai	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0,00	100 orang	100 orang	100,00
3.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan penyediaan laporan caapaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi yang akurat					50,00			83,33
3.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	30 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00	5 Dokumen	20 Dokumen	66,67
3.04.06.21	Penyusunan analisa jabatan	Jumlah laporan analisa jabatan pada dinas kehutanan dan UPT-KPH	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	19 laporan	19 laporan	100,00
3.04.08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Tersedianya data Aset/Barang Daerah yang akurat					100,00			233,33
3.04.08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	14 Dokumen	233,33
3.04.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Pencapaian Target produksi Hasil Hutan					41,22			52,70
3.04.15.03	Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah pelaksana kegiatan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0,00	18 unit	18 unit	100,00
3.04.15.08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nva	348 unit	114 unit	58 unit	58 unit	100,00	58 unit	230 unit	66,09
3.04.15.13	Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan	Jumlah IUPHHK yang diMonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	310 unit	78 unit	35 unit	35 unit	100,00	58 unit	171 unit	55,16
3.04.15.15	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/PMDH oleh Pemegang IUPHHK	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	243 unit	50 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	50 unit	20,58
3.04.15.16	Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	Jumlah pelaksana kegiatan identifikasi jasa lingkungan	18 UPT-KPH	0 UPT-KPH	18 UPT-KPH	18 UPT-KPH	100,00	2 UPT-KPH	20 UPT-KPH	111,11
3.04.15.17	Sosialisasi, promosi dan fasilitasi untuk pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan	Jumlah pelaksana kegiatan sosialisasi jasa lingkungan	18 UPT-KPH	0 UPT-KPH	18 UPT-KPH	18 UPT-KPH	100,00	0 UPT-KPH	18 UPT-KPH	100,00
3.04.15.18	Monitoring Peralatan Pengusahaan Hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam penggunaan peralatan berat pengusahaan hutan	320 unit	88 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	88 unit	27,50
3.04.15.19	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPTI dan TPTII	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan TPTI dan TPTII	256 unit	50 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	50 unit	19,53
3.04.15.20	Pembinaan dan Monitoring Perizinan Industri Primer Hasil Hutan	Jumlah IPPHK yang dimonev perizinannya	300 unit	80 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	80 unit	26,67

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.15.21	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri	Jumlah laporan : Jumlah Unit HTI	84 laporan	28 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	28 laporan	33,33
3.04.15.24	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK- HT dan IUPHHK- RE	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	150 unit	32 unit	35 unit	27 unit	77,14	40 unit	99 unit	66,15
3.04.15.25	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu	170 unit	50 unit	30 unit	30 unit	100,00	40 unit	120 unit	70,59
3.04.15.26	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam/Hutan Tanaman	Jumlah IUPHHK-HA/HT yang di monitoring dan evaluasi	310 unit	65 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	65 unit	21,10
3.04.15.30	Koordinasi dan Fasilitasi Perusahaan Daerah/BUMD untuk Bermitra dengan Pengusaha Sektor Kehutanan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi	5 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0,00	0 kali	1 kali	20,00
3.04.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan					41,18			61,82
3.04.16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Jumlah Laporan hasil penilaian dan koordinasi dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan	84 laporan	12 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	14 laporan	26 laporan	31,25
3.04.16.02	Pengadaan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan	Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan	148.600 batang	48.600 batang	40.000 batang	40.000 batang	100,00	24.200 batang	112.800 batang	75,91
3.04.16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	0 Orang	0 Orang	40 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	0 Orang	0,00
3.04.16.09	Dukungan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu PM2L	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	40 Orang	40 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	40 Orang	100,00
3.04.16.10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan	Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonev dalam pelaksanaan reklamasi hutan	120 unit	40 unit	20 unit	20 unit	100,00	20 unit	80 unit	66,67
3.04.16.11	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa	Jumlah Unit Kelembagaan Hutan Desa	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	1 unit	100,00
3.04.16.12	Koordinasi dan Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa	Jumlah Unit pembuatan hutan desa	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	1 unit	100,00
3.04.16.21	Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah laporan	14 laporan	13 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	13 laporan	92,86
3.04.16.22	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	Jumlah laporan	28 laporan	28 laporan	0 laporan	0 laporan	0,00	0 laporan	28 laporan	100,00
3.04.16.23	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	Jumlah dokumen percepatan usulan Perhutanan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.16.27	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab./Kota	Jumlah lokasi penyelenggaraan kegiatan	14 Lokasi	0 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00	14 Lokasi	16 Lokasi	114,29
3.04.16.28	Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen	70 Dokumen	0 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00	14 Dokumen	28 Dokumen	40,00
3.04.16.29	Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	Jumlah Lokasi Identifikasi	25 Lokasi	0 Lokasi	5 Lokasi	5 Lokasi	100,00	5 Lokasi	10 Lokasi	40,00
3.04.16.31	Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	Jumlah laporan	35 laporan	0 laporan	7 laporan	7 laporan	100,00	7 laporan	14 laporan	40,00
3.04.16.34	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS	Jumlah peserta bimtek	4 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0,00	0 unit	0 unit	0,00
3.04.16.36	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan	56 laporan	0 laporan	14 laporan	14 laporan	100,00	14 laporan	28 laporan	50,00
3.04.16.37	Rencana Pengelolaan Rehabilitasi di Lahan (RPRL)	Jumlah dokumen RHL yang tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
3.04.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan					39,29			47,94
3.04.17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan apel siaga dan jenis alat pendukung Dalkarhutla yang diadakan	3.000 Orang	500 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	500 Orang	16,67
		Jumlah unit pelaksana kegiatan	0 unit	unit	0 unit	0 unit	0,00	19 unit	19 unit	100,00
3.04.17.02	Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah bahan Sosialisasi Media Cetak Majalah dan Media Elektronik	6.300 Eksemplar	1.613 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0,00	0 Eksemplar	1.613 Eksemplar	25,60
3.04.17.03	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Dalkarhutla	400 Orang	77 Orang	40 Orang	40 Orang	100,00	40 Orang	157 Orang	39,25
3.04.17.04	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi kebakaran yang dipadamkan	360 lokasi	120 lokasi	60 lokasi	60 lokasi	100,00	60 lokasi	240 lokasi	66,67
3.04.17.06	Operasional Pengamanan Hutan	Jumlah pelaksana kegiatan	18 UPT-KPH	0 UPT-KPH	18 UPT-KPH	18 UPT-KPH	100,00	19 UPT-KPH	37 UPT-KPH	205,56
3.04.17.07	Pengamanan Hutan Terpadu	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan	19 kali	2 kali	4 kali	4 kali	100,00	1 kali	7 kali	37,08
3.04.17.10	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	Jumlah laporan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	19 kasus	3 kasus	1 kasus	1 kasus	100,00	1 kasus	5 kasus	26,32
3.04.17.11	Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan	Jumlah IUPHHK dan Izin Sah Lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran dibidang kehutanan	350 unit	109 unit	58 unit	47 unit	81,03	58 unit	214 unit	61,14
3.04.17.12	Penyuluhan perundang-undangan kehutanan	Jumlah materi yang disosialisasikan	6 iklan	1 iklan	0 iklan	0 iklan	0,00	0 iklan	1 iklan	16,67
		Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	50 Orang	50 Orang	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.17.14	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah unit TAHURA yang dibangun	5 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	2 unit	40,00
		Jumlah dokumen perencanaan unit TAHURA yang dibangun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.04.17.16	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Jumlah peserta forum diskusi KEE	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	20 Orang	20 Orang	20,00
3.04.17.17	Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek konservasi	100 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	25 Orang	25 Orang	25,00
3.04.17.18	Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pelaksana Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan UPTD - KPH	0 unit	0 unit	19 unit	1 unit	5,26	0 unit	1 unit	5,26
3.04.17.19	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis sarana prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan UPTD - KPH	0 jenis	0 jenis	48 jenis	19 jenis	39,58	0 jenis	19 jenis	39,58
3.04.17.20	Pembuatan Peta Sumber Daya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengolahan Data Informasi dan Diseminasi Monitoring Hotspot Tingkat Pasko Provinsi	Jumlah peta sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	0 lembar	0 lembar	10 lembar	0 lembar	0,00	0 lembar	0 lembar	0,00
3.04.17.21	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah regu MPA yang terbentuk	0 regu	0 regu	28 regu	0 regu	0,00	0 regu	0 regu	0,00
3.04.17.22	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah luas areal yang dipadamkan	0 Ha	0 Ha	100 Ha	0 Ha	0,00	0 Ha	0 Ha	0,00
3.04.17.23	Pelatihan/Pembekalan/Inhousetraining/Penyegaran/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta pelatihan	0 Orang	0 Orang	60 Orang	60 Orang	100,00	0 Orang	60 Orang	100,00
3.04.17.24	Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam rangka Penyadartahuan Pencegehan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kab/Kota yang disosialisasikan dalam pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	0 kab/kota	0 kab/kota	14 kab/kota	0 kab/kota	0,00	0 kab/kota	0 kab/kota	0,00
3.04.17.25	Patroli Pengamanan Hutan	Jumlah lokus perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	0 lokus	0 lokus	18 lokus	14 lokus	77,78	0 lokus	0 lokus	77,78
3.04.20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Jumlah peningkatan kualitas dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan hutan dan Sumber Daya Manusia di bidang Kehutanan					34,37			76,76
3.04.20.03	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana teknis dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan	18 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	12 Dokumen	65,04
3.04.20.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan kehutanan	12 Dokumen	4 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00	7 Dokumen	18 Dokumen	150,00
3.04.20.09	Penyuluhan kehutanan	Jumlah majalah kehutanan yang dicetak	6.300 Eksemplar	2.100 Eksemplar	1.000 Eksemplar	406 Eksemplar	40,60	1.000 Eksemplar	3.506 Eksemplar	55,65

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.20.18	Pameran Kehutanan	Jumlah kali mengikuti kegiatan pameran	4 kali	4 kali	0 kali	0 kali	0,00	0 kali	4 kali	100,00
3.04.20.14	Inhouse training Sistem Informasi Geografis (SIG)	Jumlah peserta yang mengikuti Inhouse Training	90 Orang	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	30 Orang	33,33
3.04.20.19	Sosialisasi Peraturan Menteri LHK Bidang Bina Usaha Kehutanan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	150 Orang	50 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00	0 Orang	50 Orang	33,33
3.04.20.23	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Sinkronisasi Program Kehutanan dan Programa Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah kali rapat yang diselenggarakan	1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	0,00	0 Orang	1 kali	100,00
3.04.23	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase operasional KPH yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur					25,32			61,98
3.04.23.01	Penyusunan neraca sumber daya hutan	Jumlah dokumen NSDH yang tersusun	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00
3.04.23.03	Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan	Jumlah laporan/monev. Kerjasama/perizinan penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3.04.23.14	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 orang	15 orang	0 orang	0 orang	0,00	0 orang	15 orang	36,84
3.04.23.15	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	Jumlah Unit yang dikelola	6 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0,00	1 unit	2 unit	39,47
		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
3.04.23.16	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa yang difasilitasi	119 desa	30 desa	0 desa	0 desa	0,00	0 desa	30 desa	25,21
3.04.23.18	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan	Jumlah Perizinan yang dimonitoring dan dievaluasi	95 unit	25 unit	35 unit	35 unit	100,00	15 unit	75 unit	78,95
3.04.23.19	Pembuatan Sistem Informasi Kehutanan	Jumlah unit sistem informasi kehutanan yang dipelihara	2 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	1 unit	50,00
3.04.23.20	Pengembangan Sarana Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah dan jenis peralatan yang diadakan	60 unit	9 unit	0 unit	0 unit	0,00	0 unit	9 unit	15,64
3.04.23.21	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen usulan TORA	70 laporan	0 laporan	14 laporan	11 laporan	78,57	14 laporan	25 laporan	35,71
3.04.23.23	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah dokumen rencana jangka menengah dan jangka pendek	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	18 Dokumen	42 Dokumen	175,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.27	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial	Jumlah pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat					97,90			79,08
3.04.27.01	Penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00
3.04.27.02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	Jumlah tenaga penyuluh yg mengikuti Bimtek	224 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang	100,00	40 Orang	80 Orang	35,71
3.04.27.03	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	Jumlah materi penyuluhan	20 materi	0 materi	4 materi	4 materi	100,00	5 materi	9 materi	45,00
3.04.27.05	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah laporan hasil Monev	56 laporan	0 laporan	8 laporan	8 laporan	100,00	14 laporan	22 laporan	39,29
3.04.27.06	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	160 Orang	0 Orang	25 Orang	25 Orang	100,00	700 Orang	725 Orang	453,13
3.04.27.07	Pameran Kehutanan	Jumlah kali mengikuti pameran	8 kali	0 kali	2 kali	2 kali	100,00	2 kali	4 kali	50,00
3.04.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah Laporan	52 laporan	0 laporan	14 laporan	13 laporan	92,86	5 laporan	18 laporan	34,62
3.04.27.13	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	Jumlah dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	50,00
3.04.27.15	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	Jumlah IUPHHK yang dimonev	232 unit	0 unit	12 unit	12 unit	100,00	58 unit	70 unit	30,17
3.04.27.16	Identifikasi Hutan Adat	Jumlah Dokumen Identifikasi	8 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	2 Dokumen	3 Dokumen	37,50
3.04.27.17	Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah penetapan wilayah hutan adat	4 penetapan	0 penetapan	1 penetapan	1 penetapan	100,00	1 penetapan	2 penetapan	50,00
3.04.27.21	Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa yang difasilitasi	79 desa	0 desa	3 desa	3 desa	100,00	3 desa	6 desa	7,59
3.04.27.22	Sosialisasi Hutan Adat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	200 peserta	0 peserta	40 peserta	40 peserta	100,00	40 peserta	80 peserta	100,00
3.04.27.23	Penilaian Lomba Warna Lestari	Jumlah kategori yang dilombakan	0 kategori	0 kategori	7 kategori	5 kategori	71,43	0 kategori	5 kategori	71,43
3.04.27.24	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat melalui Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	Jumlah lokus pelaksanaan Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	0 kab.	0 kab.	1 kab.	1 kab.	100,00	0 kab.	1 kab.	100,00
3.04.27.25	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Melalui Sosialisasi Tingkat Tapek	Jumlah peserta sosialisasi	0 orang	0 orang	20 orang	20 orang	100,00	0 orang	20 orang	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
3.04.27.26	Pendampingan Kegiatan RHL dalam Kegiatan Identifikasi Areal RHL oleh Penyuluh Kehutanan	Jumlah Laporan Identifikasi Areal RHL	0 laporan	0 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00	0 laporan	4 laporan	100,00

Palangka Raya, Agustus 2019

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

Ir. SRI SUWANTO, M.S
Pembina Tingkat I
NIP. 19670416 199803 1 002

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Indikator	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan	100%	Persentase penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan	85%	90%	95%	100%	100%	95%	105%	76%	0%	0%	85%	90%	
			Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	47%	45%	60%	75%	90%	55%	54%	62%	0%	0%	30%	45%	
2.	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan kritis dan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	100%	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0.05%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	0.01%	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.89%	0.89%	
			Jumlah ijin program perhutanan sosial	14	14	14	14	14	15	58	5	0	0	1	1	
3	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan	-	Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	2.592	2.074	1.660	1.328	1.062	844	7.088	4720	0	0	1.660	1.062	
4	Menurunnya gangguan sumber daya hutan	-	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20% per tahun	32	26	21	17	14	7	11	0	0	0	4	3	
5	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal	33 KPH	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	40%	60%	70%	80%	90%	50%	100%	100%	0%	0%	60%	70%	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran/ Volume	Catatan
			Hasil	Keluaran		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Kab. Sukamara	Tersedianya bibit tanaman mangrove	Jumlah bibit tanaman mangrove yang disediakan	2.000 batang	usulan e-proposal Kab. Sukamara
2	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan					
	Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran	Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Utara dan Kab. Murung Raya	Tersedianya peralatan portable penanganan karhutla	Jumlah peralatan yang disediakan	160 unit	usulan pada pokok pikiran dewan
		Kab. Sukamara	Tersedianya peralatan penanganan karhutla	Jumlah peralatan yang disediakan	1 paket	usulan e-proposal Kab. Sukamara
3	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan					
	Pengembangan Sarana Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Kab. Barito Utara, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Katingan, Kab. Kapuas, Kab. Pulang	Terbangunnya gedung kantor KPH	Jumlah gedung kantor yang dibangun	6 unit	usulan pada pokok pikiran dewan
4	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial					
	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat melalui Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat	Kab. Barito Selatan	Terlaksananya fasilitasi pengakuan Hutan Adat	Jumlah dokumen penetapan yang dapat difasilitasi	1 dokumen	usulan e-proposal Kab. Barito Selatan

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PILIHAN					URUSAN PILIHAN					
	KEHUTANAN					KEHUTANAN					
	Dinas Kehutanan					Dinas Kehutanan					
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan administrasi Perkantoran		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kantor	100%	8.313.266.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah surat dinas yang terkirim	2.000 surat	16.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah surat dinas yang terkirim	8.000 surat	75.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah rekening pembayaran tenaga air,listrik dan telekomunikasi	3 Rekening	460.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah rekening pembayaran tenaga air,listrik dan telekomunikasi	4 Rekening	950.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	121 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	500 Unit	70.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan yang diasuransikan	11 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan serta barang aset daerah yang diasuransikan	30 Unit	110.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operation al	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perpanjangan STNK dan Jasa KIR	8 Unit	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perpanjangan STNK dan Jasa KIR	50 Unit	650.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Pengelola keuangan dan Jumlah pegawai yang menerima Honorarium	404 OR	800.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Pengelola keuangan dan Jumlah pegawai yang menerima Honorarium	1.212 OR	1.579.666.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor	2 Jenis	150.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor	2 Jenis	770.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah mesin pemotong rumput yang memerlukan service	5 Unit	6.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah mesin pemotong rumput yang memerlukan service	5 Unit	6.600.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan	28 Jenis	65.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan	28 Jenis	690.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	70.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8 Jenis	242.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	6 Jenis	24.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	6 Jenis	125.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah eksemplar koran	20.496 Eks	100.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah eksemplar koran	40.000 Eks	75.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang diadakan	250 Porsi	16.875.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang diadakan	250 Porsi	40.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dan luar negeri	70 OT	500.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dan luar negeri	194 OT	1.500.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	60 OT	150.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	374 OT	1.400.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Rujukan Berobat PNS	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobat keluar daerah	5 Orang	25.000.000	Rujukan berobat PNS	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobat keluar daerah	5 OP	30.000.000	
II.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				960.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kantor	100%	8.875.854.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembangunan gedung kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah gedung kantor yang dibangun	5 unit	5.816.354.000	usulan kegiatan DAK FISIK
	Pengadaan peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	6 Jenis	400.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	6 Jenis	1.000.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 Rumah	30.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	1 Rumah	33.000.000	Pergeseran anggaran
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	20 Gedung	580.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	5 Mobil	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	48 Mobil	240.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	5.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 jenis	5.500.000	Pergeseran anggaran
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	68 buah : 1 unit	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	68 Buah	70.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
						Pembangunan gudang	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gudang yang dibangun	1 gudang	180.000.000	Pembangunan gudang senjata api
	Pemeliharaan rutin berkala Mess KKMA Palangka Raya	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung asrama KKMA yang dipelihara	2 gedung	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess KKMA	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung asrama KKMA yang dipelihara	2 gedung	55.000.000	
	Pembangunan Pagar Asrama KKMA	KOTA PALANGKA RAYA	Panjang Pagar asrama KKMA yang dibangun								
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jaga Asrama KKMA	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah rumah jaga asrama KKMA yang direhabilitasi								
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi plafon yang dilaksanakan	4 pekerjaan	280.000.000	renovasi/rehab bangunan
	Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung kantor yang disewa	14 Gedung Kantor	350.000.000	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Kab. Kapuas dan Kab. Sukamara	Jumlah gedung kantor yang disewa	2 bangunan	66.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
						Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah kegiatan renovasi pagar kantor dinas	1 paket	350.000.000	renovasi/rehab bangunan
						Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	200.000.000	penertiban administrasi data kantor
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				249.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	100%	345.000.000	
	Pengadaan Pakaian olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian olahraga	170 Stel	130.000.000	Pengadaan Pakaian olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	690 set	345.000.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	170 Stel	119.000.000						rasionalisasi/telah dilakukan di tahun anggaran sebelumnya
IV.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		Terwujudnya fasilitas pindah/purna tugas PNS		10.000.000	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		Terwujudnya fasilitas pindah/purna tugas PNS	2 Orang	11.000.000	
	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	KOTA PALANGKA RAYA	Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas	2 Orang	10.000.000	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	KOTA PALANGKA RAYA	Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas	2 Orang	11.000.000	
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya SDM Aparatur		85.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya SDM Aparatur	100%	490.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	5 Orang	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	20 Or	150.000.000	peningkatan kualitas SDM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Studi Lapangan di Dalam Negeri	Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendampingi anggota Legislatif	15 DT	60.000.000	Studi Lapangan di Dalam Negeri	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendampingi anggota Legislatif	15 DT	90.000.000	
						Pendidikan dan pelatihan teknis	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta bimbingan teknis tenaga fungsional tertentu	200 Orang	150.000.000	peningkatan kompetensi jabfung
						Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jabfung yang dinilai angka kreditnya	200 Orang	100.000.000	peningkatan kompetensi jabfung
VI.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100%	100.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100%	666.000.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	5 Dokum en	100.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	5 Dokumen	250.000.000	
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan keuangan	5 Laporan	80.000.000	pemantapan kinerja dan akuntabilitas
						Penyusunan Analisa Jabatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan analisa jabatan	19 Laporan	136.000.000	pemantapan kinerja dan akuntabilitas
						Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan yang disediakan	2 Laporan	80.000.000	pemantapan kinerja dan akuntabilitas
						Pengembangan Reformasi Birokrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan reformasi birokrasi	1 dokumen	120.000.000	pemantapan kinerja dan akuntabilitas
VII.	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Tersedianya data Aset/Barang Daerah yang akurat	100%	50.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		Tersedianya data Aset/Barang Daerah yang akurat	100%	240.000.000	
	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	KOTA PALAN GKA RAYA	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	1 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	6 Dokumen	240.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
VIII.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan	95%	2.780.741.000	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Persentase pencapaian target produksi hasil hutan	95%	1.355.000.000	
						Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah unit pelaksana kegiatan	2 unit	300.000.000	kinerja UPT-KPH
	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nya	58 Unit IUPHHK	500.000.000	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nya	58 Unit IUPHHK	425.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring dan evaluasi standar akutansi kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang diMonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	58 Unit IUPHHK	250.000.000	Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	58 Unit IUPHHK	100.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring dan evaluasi kelola sosial/pmdh oleh pemegang IUPHHK	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	50 Unit IUPHHK	160.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring peralatan pengusahaan hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam penggunaan peralatan berat pengusahaan hutan	58 Unit IUPHHK	300.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan TPTI, TPTII	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan TPTI dan TPTII	58 Unit IUPHHK	160.741.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembinaan dan Monitoring Perizinan Industri Primer Hasil Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IPPHK yang dimonev perizinannya	50 Unit IPHHK	200.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Industri	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan ; Jumlah Unit HTI	14 Laporan; 20 Unit	110.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen rencana pemanfaatan jasa lingkungan	2 Dokumen	500.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen hasil identifikasi	2 UPT-KPH	200.000.000	penyiapan dokumen perencanaan tingkat tapak
	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	25 Unit IUPHHK	150.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK- HT dan IUPHHK-RE	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	25 Unit IUPHHK	165.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPHK, IPKH/TMKH dan APL	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu	30 Unit	150.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian Ijin Pemanfaatan Kayu	30 Unit	165.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam/Hutan Tanaman	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang di monitoring dan evaluasi	58 Unit IUPHHK	150.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Koordinasi dan Fasilitasi Perusahaan Daerah/BUMD untuk Bermitra Dengan Pengusaha Sektor Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi	1 Kali	150.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
IX.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan	2.000 Ha	3.893.045.000	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan	2.000 Ha	1.025.000.000	
	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Laporan hasil penilaian dan koordinasi dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan	14 laporan	175.692.000	Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan					rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan	25.000 Batang	381.661.000	Pembuatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan	Palangka Raya	Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan	40.000 Batang	250.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonev dalam pelaksanaan reklamasi hutan	20 Unit Usaha Pertambangan	175.692.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonev dalam pelaksanaan reklamasi hutan	20 Unit Usaha Pertambangan	125.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Identifikasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan di Kab./Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Lokasi Identifikasi	14 Lokasi	250.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	300.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab./Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Lokasi	14 Lokasi	500.000.000	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab./Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Lokasi	14 Lokasi	100.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	14 Dokumen	200.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Lokasi Identifikasi	5 Lokasi	100.000.000	Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Lokasi Identifikasi	5 Lokasi	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan hasil inventarisasi	7 Laporan	200.000.000	Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan hasil inventarisasi	7 Laporan	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta sosialisasi	40 Orang	100.000.000	Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta sosialisasi	40 Orang	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan DAS	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Unit	1 Unit	230.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembentukan Forum Pengelolaan DAS	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kelompok	1 Kelompok	800.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Laporan	14 Laporan	180.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Laporan monev	14 Laporan	110.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
X.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan		Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan	100%	3.473.825.000	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan		Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan	100%	1.515.000.000	
	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan apel siaga dan jenis alat pendukung Dalkarhutla yang diadakan	500 Orang	202.700.000	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah titik pantau yang diamati	50 titik	100.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah bahan Sosialisasi Media Cetak Majalah dan Media Elektronik	1.050 Eks. Majalah	232.769.000						penyesuaian program terkait indikator kinerja
	Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Dalkarhuta	80 Orang	300.000.000	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Dalkarhuta	40 Orang	155.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah lokasi kebakaran yang dipadamkan	60 lokasi	489.178.000	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah lokasi kebakaran yang dipadamkan	60 lokasi	315.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
						Operasional Pengamanan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah titik pantau yang diamati	20 titik	70.000.000	penyesuaian kebutuhan dinas dan UPT-KPH
	Pengamanan hutan terpadu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan	4 Kali operasi	489.178.000	Pengamanan Hutan Terpadu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan	1 Kali operasi	100.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	4 Kasus	310.000.000	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	1 Kasus	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran di bidang kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK dan Izin Sah Lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran di bidang kehutanan	58 Unit Manajemen Kehutanan/Perkebunan	400.000.000	Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK dan Izin Sah Lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran di bidang kehutanan	58 unit	150.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyuluhan perundang-undangan kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah materi yang disosialisasikan	1 Iklan	100.000.000	Penyuluhan perundang-undangan kehutanan					rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah unit Tahura yang dibangun	1 Unit	400.000.000	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TAHURA yang diselesaikan	3 dokumen	165.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi/Tidak Masuk Lampiran (Appendix) CITES	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan	14 Laporan	150.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi/Tidak Masuk Lampiran (Appendix) CITES					rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah peserta FDG KEE	100 Orang	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	200.000.000	Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah peserta bimtek konservasi	30 orang	100.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
						Bina Cinta Alam	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	200.000.000	kegiatan baru
XI.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Terselenggaranya reformasi birokrasi dan meningkatnya kapasitas SDM Kehutanan	1 Tahun	350.000.000	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Terselenggaranya reformasi birokrasi dan meningkatnya kapasitas SDM Kehutanan	1 Tahun	720.000.000	
	Penyelenggaraa n Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen rencana teknis dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan	3 Dokumen	250.000.000	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen rencana teknis dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan	3 Dokumen	250.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen perencanaan kehutanan	2 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan urusan kehutanan	7 Dokumen	350.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
						Penyuluhan kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah kali publikasi informasi	12 kali	120.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
XII.	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pematapan Kawasan Hutan.		Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh masyarakat	50%	2.265.000.000	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pematapan Kawasan Hutan		Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh masyarakat	50%	850.000.000	
	Penyusunan neraca sumber daya hutan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen NSDH	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan					rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen RKTP yang tersusun	1 Dokumen	150.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
						Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan movev penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan	14 Laporan	120.000.000	teraksanansi amanat Permen LHK Nomor P.81/MENLHK/SET.IGN/KUM.LAN/2016
	Identifikasi Hutan Adat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen Identifikasi	2 Dokumen	150.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Unit yang dikelola	1 Unit	350.000.000	Pengelolaan Hutan Monumental Nyaru Menteng					rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Desa yang difasilitasi	19 Desa	200.000.000						dialihkan penyesuaian program
	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan/Non Pertambangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Perizinan yang dimonitoring dan dievaluasi	15 Unit IUPHHK-HA/ HTI, 10 IPPKH, 10 PKH	175.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Perizinan yang dimonitoring dan dievaluasi	15 Unit	150.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Pengembangan Sarana Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dan jenis peralatan yang diadakan	10 Unit	250.000.000	Pengembangan Sarana Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)					rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen Kajian Perubahan Fungsi			Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen usulan TORA	14 Dokumen	180.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Sosialisasi Pembangunan KPH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi	4 Lokasi	200.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Jangka Pendek dan Jangka Menengah Pengelolaan KPH	2 Dokumen	240.000.000	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen perencanaan KPH yang tersusun	18 Dokumen	250.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
XIII.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial		Persentase pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	50%	2.580.000.000	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial		Persentase pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	50%	1.743.000.000	
	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen	1 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Program Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen	1 Dokumen	80.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Tenaga Penyuluh yang Mengikuti Diklat/Bimtek	56 Orang	200.000.000	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Tenaga Penyuluh yang Mengikut Diklat/Bimtek	40 Orang	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Materi Penyuluhan	5 Materi	100.000.000	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis materi penyuluhan	5 jenis materi	60.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Produktif	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg didampingi	5 KTH	100.000.000	Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat Produktif	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg didampingi	5 KTH	-	penambahan sesuai beban kegiatan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Laporan Hasil Movev	14 Laporan	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Laporan Hasil Movev	14 Laporan	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	KOTA PALANGKA RAYA	memingkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan kemasyarakatan dan aneka usaha kehutanan	40 Orang	225.000.000	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah peserta pelatihan	80 Orang	150.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Pameran Kehutanan	LUAR PROVIN SI	Jumlah kali mengikuti kegiatan pameran	2 Kali Pameran	200.000.000	Pameran Kehutanan	Palangka Raya dan Luar Daerah	Jumlah kali mengikuti kegiatan pameran	2 Kali Pameran	250.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Unit Kelembagaan Hutan Desa	2 Kabupaten	140.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa	Kab. Kapuas	Jumlah daerah pelaksana Hutan Desa	2 lokasi	100.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Unit pembuatan hutan desa	2 Kabupaten	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pembuatan Hutan Desa	Kab. Kapuas	Jumlah daerah pelaksana hutan desa	2 Lokasi	-	penambahan sesuai beban kegiatan
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan dan Jumlah Unit HR	13 Laporan:Unit	110.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah daerah pelaksana HTR	2 Lokasi	100.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi pembangunan hutan rakyat	14 Laporan	80.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah daerah pelaksana hutan rakyat	2 Lokasi	88.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Pengembangan Kelompok Tani Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah kelompok Tani Hutan yang dikembangkan	7 KTH	70.000.000	Pengembangan Kelompok Tani Hutan	Kapuas, Bartim, Pulang Pisau, Kobar, Palangka Raya, Lamandau	Jumlah kelompok Tani Hutan yang dikembangkan	7 KTH	-	penambahan sesuai beban kegiatan
	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	KOTA PALANGKA RAYA	Tersusunnya rencana kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial untuk mempercepat mendukung usulan-usulan masyarakat dalam bidang perhutanan sosial	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen rencana kerja Pokja perhutanan sosial	1 Dokumen	75.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Koordinasi Pemenuhan Kewajiban Kemitraan Usaha Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kali Rapat Koordinasi	1 Dokumen	50.000.000	Pemenuhan Kewajiban Kemitraan Usaha Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kali Rapat Koordinasi	1 kali	60.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	58 Unit IUPHHK	150.000.000	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	58 unit	120.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Identifikasi Hutan Adat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen Identifikasi Hutan Adat	2 Dokumen	150.000.000	Identifikasi Hutan Adat					penambahan sesuai beban kegiatan
	Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Penetapan Wilayah Hutan Adat	1 Penetapan	100.000.000	Pendampingan Penetapan/Pengakuan Masyarakat Hukum Adat					penambahan sesuai beban kegiatan
	Pendampingan Pengelolaan Hutan Adat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Unit Hutan Adat yang dikelola	1 Unit	50.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Kawasan Hutan dengan Tujuan Religi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Desa yang difasilitasi	1 Desa	100.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Adat/Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Religi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Laporan Hasil Monev	3 Laporan	30.000.000						rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Desa yang difasilitasi	19 Desa	200.000.000	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Desa yang difasilitasi	3 Desa	80.000.000	rasionalisasi sesuai kebutuhan
	Sosialisasi Hutan Adat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Peserta	100.000.000	Sosialisasi Hutan Adat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	100.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan
	Sosialisasi Hutan Adat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Peserta	100.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah paket sarana dan prasarana yang disediakan	3 paket	320.000.000	penambahan sesuai beban kegiatan

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3				URUSAN PILIHAN								
3	04			KEHUTANAN								
3	04	01		Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kantor		100%	8.313.266.000			100%	9.144.592.600
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8.000 surat	75.000.000	APBD		8.000 surat	82.500.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	KOTA PALANGKA RAYA	4 Rekening	950.000.000	APBD		4 Rekening	1.045.000.000
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	500 Unit	70.000.000	APBD		500 Unit	77.000.000
3	04	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung kantor dan rumah jabatan serta barang aset daerah yang diasuransikan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30 Unit	110.000.000	APBD		30 Unit	121.000.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan dan perpanjangan STNK dan Jasa KIR	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	50 Unit	650.000.000	APBD		50 Unit	715.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola keuangan dan Jumlah pegawai yang menerima Honorarium	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.212 OB	1.579.666.000	APBD		1.212 OB	1.737.632.600
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis sarana pendukung kebersihan kantor	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Jenis	770.000.000	APBD		2 Jenis	847.000.000
3	04	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah mesin pemotong rumput yang memerlukan service	KOTA PALANGKA RAYA	5 Unit	6.600.000	APBD		5 Unit	7.260.000
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diperlukan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	28 Jenis	690.000.000	APBD		28 Jenis	759.000.000
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8 Jenis	242.000.000	APBD		8 Jenis	266.200.000
3	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik yang diperlukan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	6 Jenis	125.000.000	APBD		6 Jenis	137.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	40.000 Eks	75.000.000	APBD		40.000 Eks	82.500.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Rapat yang diadakan	KOTA PALANGKA RAYA	250 Porsi	40.000.000	APBD		250 Porsi	44.000.000
3	04	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dan luar negeri	LUAR PROVINSI	194 OT	1.500.000.000	APBD		194 OT	1.650.000.000
3	04	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	374 OT	1.400.000.000	APBD		374 OT	1.540.000.000
3	04	01	35	Rujukan berobat PNS	Jumlah pegawai yang memerlukan rujukan berobat keluar daerah	LUAR PROVINSI	5 OP	30.000.000	APBD		5 OP	33.000.000
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kantor		100%	8.875.854.000			100%	9.763.439.400
3	04	02	03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor KPH yang dibangun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 unit	5.816.354.000	DAK		5 unit	6.397.989.400
3	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	5 Jenis	1.000.000.000	APBD		6 Jenis	1.100.000.000
3	04	02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	KOTA PALANGKA RAYA	1 Rumah	33.000.000	APBD		1 Rumah	36.300.000
3	04	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	20 Gedung	580.000.000	APBD		20 Gedung	638.000.000
3	04	02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang dipelihara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	29 unit	240.000.000	APBD		29 Mobil	264.000.000
3	04	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	KOTA PALANGKA RAYA	1 Jenis	5.500.000	APBD		1 jenis	6.050.000
3	04	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Jenis	70.000.000	APBD		68 Buah	77.000.000
3	04	02	39	Pembangunan gudang	Jumlah gudang yang dibangun	KOTA PALANGKA RAYA	1 gudang	180.000.000	APBD		1 gudang	198.000.000
3	04	02	58	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess KKMA	Jumlah gedung asrama KKMA yang dipelihara	KOTA PALANGKA RAYA	2 gedung	55.000.000	APBD		2 gedung	60.500.000
3	04	02	141	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah kegiatan rehabilitasi plafon yang dilaksanakan	KOTA PALANGKA RAYA	4 kegiatan	280.000.000	APBD		4 kegiatan	308.000.000
3	04	02	149	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Jumlah gedung kantor yang disewa	Kab. Kapuas dan Kab. Sukamara	2 bangunan	66.000.000	APBD		2 bangunan	72.600.000
3	04	02	179	Renovasi Sedang/Berat Pagar Kantor Dinas	Jumlah kegiatan renovasi pagar kantor dinas	KOTA PALANGKA RAYA	1 paket	350.000.000	APBD		1 paket	385.000.000
3	04	02	180	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	KOTA PALANGKA RAYA	2 Kegiatan	200.000.000	APBD		2 Kegiatan	220.000.000
3	04	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional		100%	345.000.000			100%	379.500.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	03	01	Pengadaan Pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	KOTA PALANGKA RAYA	690 set	345.000.000	APBD		690 set	379.500.000
3	04	04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Terwujudnya fasilitas pindah/purna tugas PNS		2 Orang	11.000.000			2 Orang	12.100.000
3	04	04	02	Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas	Prosentase pegawai yang tewas dalam tugas	KOTA PALANGKA RAYA	2 Orang	11.000.000	APBD		2 Orang	12.100.000
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur		100%	490.000.000			100%	539.000.000
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Birtek	LUAR PROVINSI	20 OT	150.000.000	APBD		20 OT	165.000.000
3	04	05	22	Studi Lapangan di Dalam Negeri	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mendampingi anggota Legislatif	LUAR PROVINSI	15 OT	90.000.000	APBD		15 OT	99.000.000
3	04	05	98	Pendidikan dan pelatihan teknis	Jumlah peserta diklat teknis tenaga fungsional tertentu	KOTA PALANGKA RAYA	200 Orang	150.000.000	APBD		200 Orang	165.000.000
3	04	05	147	Penilaian Angka Kredit Fungsional Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah JFT yang dinilai angka kreditnya	KOTA PALANGKA RAYA	200 Orang	100.000.000	APBD		200 Orang	110.000.000
3	04	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu		100%	666.000.000			100%	732.600.000
3	04	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 Dokumen	250.000.000	APBD		5 Dokumen	275.000.000
3	04	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 Laporan	80.000.000	APBD		5 Laporan	88.000.000
3	04	06	21	Penyusunan Analisa Jabatan	Jumlah laporan analisa jabatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	19 Laporan	136.000.000	APBD		19 Laporan	149.600.000
3	04	06	28	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas	Jumlah laporan yang disediakan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Laporan	80.000.000	APBD		2 Laporan	88.000.000
3	04	06	87	Pengembangan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan reformasi birokrasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 dokumen	120.000.000	APBD		1 dokumen	132.000.000
3	04	08		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Tersedianya data Aset/Barang Daerah yang akurat		100%	240.000.000			100%	264.000.000
3	04	08	01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	6 Dokumen	240.000.000	APBD		6 Dokumen	264.000.000
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase pencapaian target produksi hasil hutan		95%	1.355.000.000			95%	1.490.500.000
3	04	15	03	Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu	Jumlah unit pelaksana kegiatan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 unit	300.000.000	APBD		2 unit	330.000.000
3	04	15	08	Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	Jumlah IUPHHK yang dimonev produksi kayu bulatnya dan kewajiban Pembayaran PSDH dan DR nya	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	58 Unit IUPHHK	425.000.000	APBD		58 Unit IUPHHK	467.500.000
3	04	15	13	Monitoring dan Evaluasi Standar Akutansi Kehutanan	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan penerapan standar akutansi kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	58 Unit IUPHHK	100.000.000	APBD		58 Unit IUPHHK	110.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	15	16	Identifikasi Areal Hutan Alam untuk Prakondisi Pemanfaatan dan Pengembangan Jasa Lingkungan	Jumlah dokumen hasil identifikasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 UPT-KPH	200.000.000	APBD		2 UPT-KPH	220.000.000
3	04	15	24	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan PHPL pada IUPHHK-HA, IUPHHK- HT dan IUPHHK- RE	Jumlah IUPHHK yang dilaksanakan pembinaan dan pengendalian	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	25 Unit IUPHHK	165.000.000	APBD		25 Unit IUPHHK	181.500.000
3	04	15	25	Pembinaan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Kayu Pada IPPKH, IPKH/TMKH dan APL	Jumlah unit usaha pemegang IPK yang dilakukan pembinaan dan pengendalian ljin Pemanfaatan Kayu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30 Unit	165.000.000	APBD		30 Unit	181.500.000
3	04	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan		2.000 Ha	1.025.000.000			2.000 Ha	1.127.500.000
3	04	16	02	Pembuatan Benih/Bibit Tanaman Kehutanan	Jumlah benih/bibit tanaman kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	40.000 Batang	250.000.000	APBD		40.000 Batang	275.000.000
3	04	16	10	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reklamasi Hutan	Jumlah unit usaha pertambangan yang dimonev dalam pelaksanaan reklamasi hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	20 Unit Usaha Pertambangan	125.000.000	APBD		20 Unit Usaha Pertambangan	137.500.000
3	04	16	27	Penyelenggaraan Reboisasi dan Rehabilitasi Melalui Penanaman/Penghijauan di Kab/Kota	Jumlah Lokasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Lokasi	100.000.000	APBD		14 Lokasi	110.000.000
3	04	16	28	Penyusunan Rencana Pembangunan/Pengembangan Hutan Kota/Hutan Rakyat/Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Dokumen	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Dokumen	200.000.000	APBD		14 Dokumen	220.000.000
3	04	16	29	Identifikasi Areal Sumberdaya Genetik	Jumlah Lokasi Identifikasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 Lokasi	80.000.000	APBD		5 Lokasi	88.000.000
3	04	16	31	Inventarisasi Pengada/Pengedar Benih dan Bibit Terdaftar	Jumlah laporan hasil inventarisasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7 Laporan	80.000.000	APBD		7 Laporan	88.000.000
3	04	16	33	Sosialisasi Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah peserta sosialisasi	KOTA PALANGKA RAYA	40 Orang	80.000.000	APBD		40 Orang	88.000.000
3	04	16	36	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan monev	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Laporan	110.000.000	APBD		14 Laporan	121.000.000
3	04	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Persentase penyelesaian kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan		100%	1.515.000.000			100%	1.666.500.000
3	04	17	01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik pantau yang diamati	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	50 titik	100.000.000	APBD		50 titik	110.000.000
3	04	17	03	Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Dalkarhutla	KOTA PALANGKA RAYA	40 Orang	155.000.000	APBD		40 Orang	170.500.000
3	04	17	04	Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah lokasi kebakaran yang dipadamkan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	60 lokasi	315.000.000	APBD		60 lokasi	346.500.000
3	04	17	06	Operasional Pengamanan Hutan	Jumlah titik pantau yang diamati	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	20 titik	70.000.000	APBD		20 titik	77.000.000
3	04	17	07	Pengamanan Hutan Terpadu	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kali operasi	100.000.000	APBD		1 Kali operasi	110.000.000
3	04	17	10	Penanganan Pasca Operasi Pengamanan Hutan	Jumlah laporan penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kasus	80.000.000	APBD		1 Kasus	88.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	17	11	Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran di Bidang Kehutanan	Jumlah IUPHHK dan Izin Sah Lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut pelanggaran di bidang kehutanan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	58 unit	150.000.000	APBD		58 unit	165.000.000
3	04	17	14	Pembangunan dan Pengembangan TAHURA Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TAHURA yang diselesaikan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 dokumen	165.000.000	APBD		3 dokumen	181.500.000
3	04	17	16	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Jumlah peserta FDG KEE	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100 Orang	80.000.000	APBD		100 Orang	88.000.000
3	04	17	17	Pengelolaan Daerah Penyangga KSA/KPA	Jumlah peserta bimtek konservasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	30 orang	100.000.000	APBD		30 orang	110.000.000
3	04	17	34	Bina Cinta Alam	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 kegiatan	200.000.000	APBD		3 kegiatan	220.000.000
3	04	20		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terselenggaranya reformasi birokrasi dan meningkatnya kapasitas SDM Kehutanan		1 Tahun	720.000.000			1 Tahun	792.000.000
3	04	20	03	Penyelenggaraan Rakornis Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rencana teknis dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	3 Dokumen	250.000.000	APBD		3 Dokumen	275.000.000
3	04	20	04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan urusan kehutanan	KOTA PALANGKA RAYA	7 Dokumen	350.000.000	APBD		7 Dokumen	385.000.000
3	04	20	09	Penyuluhan kehutanan	Jumlah majalah yang dicetak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.000 eksemplar	120.000.000	APBD		1.000 eksemplar	132.000.000
3	04	23		Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh masyarakat		50%	850.000.000			50%	935.000.000
3	04	23	03	Monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan	Jumlah laporan movev penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Laporan	120.000.000	APBD		14 Laporan	132.000.000
3	04	23	07	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen RKTP yang tersusun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	165.000.000
3	04	23	18	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Koridor IUPHHK-HA/HTI dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan/Non Pertambangan	Jumlah Perizinan yang dimonitoring dan dievaluasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	15 Unit	150.000.000	APBD		15 Unit	165.000.000
3	04	23	21	Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen usulan TORA	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Dokumen	180.000.000	APBD		14 Dokumen	198.000.000
3	04	23	23	Penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Pendek Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah dokumen perencanaan KPH yang tersusun	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	18 Dokumen	250.000.000	APBD		18 Dokumen	275.000.000
3	04	27		Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial	Persentase pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat		80%	1.743.000.000			90%	1.917.300.000
3	04	27	01	Penyusunan Programa Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen	KOTA PALANGKA RAYA	1 Dokumen	80.000.000	APBD		1 Dokumen	88.000.000
3	04	27	02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyuluh Kehutanan	Jumlah Tenaga Penyuluh yang Mengikuti Diklat/Bimtek	KOTA PALANGKA RAYA	40 Orang	80.000.000	APBD		40 Orang	88.000.000
3	04	27	03	Penyusunan Materi Penyuluhan dan Publikasi	Jumlah jenis materi penyuluhan	KOTA PALANGKA RAYA	5 jenis materi	60.000.000	APBD		5 jenis materi	66.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	27	05	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	Jumlah Laporan Hasil Monev	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Laporan	80.000.000	APBD		14 Laporan	88.000.000
3	04	27	06	Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Jumlah peserta pelatihan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	80 Orang	150.000.000	APBD		80 Orang	165.000.000
3	04	27	07	Pameran Kehutanan	Jumlah kali mengikuti kegiatan pameran	LUAR PROVINSI	2 Kali Pameran	250.000.000	APBD		2 Kali Pameran	275.000.000
3	04	27	08	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengelolaan Hutan Desa	Jumlah daerah pelaksana Hutan Desa	KAB. KAPUAS	2 lokasi	100.000.000	APBD		2 lokasi	110.000.000
3	04	27	10	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah daerah pelaksana HTR	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Lokasi	100.000.000	APBD		2 Lokasi	110.000.000
3	04	27	11	Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Hutan Rakyat	Jumlah daerah pelaksana hutan rakyat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 Lokasi	88.000.000	APBD		2 Lokasi	96.800.000
3	04	27	13	Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial	Jumlah dokumen rencana kerja Pokja perhutanan sosial	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	75.000.000	APBD		1 Dokumen	82.500.000
3	04	27	14	Pemenuhan Kewajiban Kemitraan Usaha Kehutanan	Jumlah Kali Rapat Koordinasi	KOTA PALANGKA RAYA	1 kali	60.000.000	APBD		1 kali	66.000.000
3	04	27	15	Monitoring dan Evaluasi Kelola Sosial/Kemitraan Kehutanan oleh Pemegang IUPHHK/Usaha Kehutanan Lainnya	Jumlah IUPHHK yang dimonev dalam pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	58 unit	120.000.000	APBD		58 unit	132.000.000
3	04	27	21	Penyelesaian Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan	Jumlah Desa yang difasilitasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 Desa	80.000.000	APBD		3 Desa	88.000.000
3	04	27	22	Sosialisasi Hutan Adat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	KOTA PALANGKA RAYA	40 Orang	100.000.000	APBD		40 Orang	110.000.000
3	04	27	22	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah paket sarana dan prasarana yang disediakan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3 paket	320.000.000	DAK		3 paket	352.000.000
TOTAL								26.149.120.000				28.764.032.000